

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI



dikeluarkan oleh:

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Versi 1.0 - Tahun 2010

TIM PARADIGMA PENDIDIKAN

ANGGOTA BSNP

1. Prof. Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG. (*Koordinator*)
2. Prof. Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
3. Prof. Dr. rer. nat. Gunawan Indrayanto
4. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.
5. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit
6. Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd.
7. Pdt. Weinata Sairin, M.Th

TIM AHLI PENGEMBANG PARADIGMA PENDIDIKAN

1. Prof. Dr. Edi Sedyawati (Ketua)
2. Prof. Dr. Bambang Hidayat
3. Prof. Dr. M. Ansjar, Ph.D
4. Prof. Dr. Imam Buchori Zainuddin
5. Prof. Dr. Budiono Kusumohamidjojo
6. Prof. Dr. AT Sugito, SH, MM
7. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc
8. Prof. Dr. Ichlasul Amal
9. Prof. Dr. Mulyohadi Ali
10. Dr. Imam Prasodjo
11. Dr. Terry Mart
12. Prof. Dr. Gaguk Margono

DAFTAR ISI

TIM PARADIGMA PENDIDIKAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I: PENDAHULUAN	5
1.1. Pengertian Pendidikan	5
1.2. Falsafah Pendidikan.....	5
1.3. Paradigma Pendidikan.....	6
BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL	8
2.1. Pendidikan di Indonesia Masa Lalu	8
2.2. Pendidikan Nasional Dewasa Ini	12
2.3. Catatan tentang Pendidikan Nasional Dewasa Ini.....	14
2.3.1 Hasil Pendidikan.....	15
2.3.2. Pelaksana dan Pelaksanaan Pendidikan	14
2.3.3. Kebijakan Pendidikan	15
2.4. Relevansi Faktor Geo-demografi bagi Paradigma Pendidikan	16
2.4.1. Profil Demografis.....	16
2.4.2. Konsekuensi Geo-demografis.....	17
2.5. Sistem dan Kategorisasi Pendidikan	18
2.6. Peraturan Perundang-undangan.....	19
BAB III: Tantangan Pendidikan Abad XXI.....	20
3.1. Karakteristik Abad XXI	20
3.2. Kompleksitas Abad XXI.....	21
3.3. Tantangan Abad XXI.....	21
3.4. Modern, Post-modern, dan Modernisasi	22
3.5. Teknologi dan Budaya Abad XXI.....	24
3.6. Paradigma Keilmuan Baru.....	25
3.7. Tekno-Sains	25
3.8. Budaya Internet dan Cyber Society.....	26
3.9. Globalisasi dan Pendidikan	27
BAB IV: PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI.....	38
4.1. Konteks Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional	38
4.2. Transisi ke Abad XXI	39
4.3. Tujuan Pendidikan Nasional Abad XXI.....	40
4.4. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI.....	42
4.5. Kuliafikasi SDM Abad XXI.....	44
BAB V: STRATEGI PENCAPAIAN	4746
5.1. Model Pendidikan Masa Mendatang.....	47

5.1.1. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan.....	47
5.1.2. Peran Strategis Guru/Dosen dan Peserta Didik.....	46
5.1.3. Metode Belajar Mengajar Kreatif.....	47
5.1.4. Materi Ajar yang Kontekstual.....	48
5.1.5. Struktur Kurikulum Mandiri berbasis Individu	48
5.2. Pergeseran Paradigma Pendidikan	49
5.2.1. Perubahan Paradigma Belajar Mengajar	49
5.3. Strategi Pengambilan Kebijakan.....	50
5.3.1. Input.....	51
5.3.2. Proses.....	52
5.3.3. Luaran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Pendidikan

Ide dasar pendidikan itu adalah kerja membangun manusia supaya dia bisa *survive* melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar-manusia (Freud, 2007: 55-56). Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks pengetahuan dan kecakapan (*capacities*) diteruskan kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan kecakapan terdahulu (Han Feizi, ca. 280 -233SM).

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor 20 Tahun 2003).
- b. Ki Hajar Dewantoro: pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisah-pisahkan, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi pendidikan beryujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU Sisdiknas, pasal 3). Pendidikan dengan demikian pada dasarnya merupakan sarana proses humanisasi, proses pemberdayaan, dan sosialisasi, dalam kerangka mana terjadi proses pembangunan manusia yang inovatif, berdaya kritis, berpengetahuan, berkepribadian, dan taat azas (Zainuddin, 2010).

Dalam konteks globalisasi, pendidikan harus mampu mempertahankan budaya dan jati diri bangsa di tengah-tengah gencarnya gempuran beragam budaya dan peradaban bangsa lain. Sebagai sebuah negara yang kaya akan suku budaya yang beraneka ragam (heterogen), Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam arti sanggup memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, cita-cita, dan impiannya.

1.2. Falsafah Pendidikan

Pemahaman mengenai pendidikan itu berubah dari waktu ke waktu serta dari pendidik yang satu ke pendidik yang lain. Pendidikan itu pada dasarnya memang bisa dipahami sebagai proses, di mana pendidik melakukan transfer pengetahuan, kecakapan dan nilai-

nilai kepada anak didik dalam suatu proses pembentukan kemampuan fisik (yang sehat), kemampuan nalar (yang cerdas) maupun karakter (yang utama), melalui suatu proses yang merupakan upaya sosialisasi dan enkulturasi yang terlembaga, baik dalam ranah formal, non formal, dan informal.

Dalam kerangka konsep Ki Hajar Dewantara pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang, menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif).

Pesan mengenai ekstensi pendidikan yang siap bahkan untuk jangkauan masa depan sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara (1889-1959) (terlahir: Raden mas Soewardi Soerjaningrat), hampir seabad yang lalu: “pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri; Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang.

1.3. Paradigma Pendidikan

Paradigma ilmu dirumuskan oleh Kuhn sebagai kerangka teoritis, atau suatu cara memandang dan memahami alam, yang telah digunakan oleh komunitas ilmuwan sebagai pandangan dunianya. Paradigma ilmu ini berfungsi sebagai lensa, sehingga melalui lensa ini para ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut.

Paradigma diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas kepada sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.

Dengan pengertian-pengertian di atas, Paradigma Pendidikan dan Paradigma Pendidikan Nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

”Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut”

“Paradigma pendidikan nasional adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan nasional, dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut.”

Ke dalam cara pandang itu termasuk tantangan dasar yang dihadapi manusia dalam kaitannya dengan tata sosial, kebudayaan serta lingkungan alamnya.

Konsep paradigma Pendidikan Nasional yang disusun ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya, dan melibatkan pula penentuan persyaratan pelaksana-pelaksananya. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pendidikan ini, perlu diperhitungkan pengaruh berbagai sumber belajar, termasuk yang informal dan di dunia maya yang kesemuanya dapat mempunyai pengaruh tersendiri kepada peserta didik. Perumusan paradigma pendidikan nasional yang akan dianut ini, perlu didasarkan pada tujuan, atau apa yang diharapkan dari hasil pendidikan kita yang akan datang. Hal ini akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL

Setelah pada bab terdahulu didudukkan konsep-konsep dasar mengenai pengertian pendidikan, falsafah pendidikan, dan paradigma pendidikan, maka di dalam bab II ini akan diberikan gambaran umum mengenai posisi “pendidikan nasional” di Indonesia. Bab ini akan dimulai dengan suatu paparan ringkas mengenai “pendidikan di Indonesia di masa lalu”, yang merupakan suatu latar mengenai bekal pengalaman bangsa sebelum kemudian ‘membangun’ suatu sistem pendidikan nasional. Setelah bagian “bekal dari masa lalu” itu maka menyusul sub-sub bab tentang keadaan dewasa ini, di mana bahasan dipusatkan pada beberapa aspek penting dalam bangunan Pendidikan Nasional itu, yang meliputi: (1) aspek “geo-demografi” yang berkenaan dengan bentang wilayah serta komposisi penduduk, yang keduanya dipaparkan beserta varian-varian kondisi di dalamnya, beserta kemungkinan pengaruhnya terhadap upaya pendidikan; kemudian, (2) aspek kategorisasi jenis dan penyelenggara pendidikan, serta pada sub-bab terakhir dipaparkan, sub-bab (3) mengenai sistem dan substansi perangkat legal yang melandasi penyelenggaraan Pendidikan Nasional itu.

2.1. Pendidikan di Indonesia Masa Lalu

Masa lalu sebelum abad XXI dalam hal pendidikan untuk Indonesia dapat dibagi secara urutan waktu kurang lebih sebagai berikut: (a) zaman pra-kolonial yang lebih rinci dapat dibagi ke dalam masa prasejarah dan masa sejarah, (b) zaman kolonial ketika sistem pendidikan ‘modern’ dari Eropa diperkenalkan, dan (c) zaman kemerdekaan RI yang berlangsung hingga sekarang, sebelum dan sesudah abad XXI.

Di luar sistem persekolahan ‘modern’ seperti yang semula diperkenalkan oleh kolonialis Belanda, terdapat berbagai ‘institusi’ pendidikan dalam lingkup masyarakat-masyarakat tradisional, baik dalam keterkaitannya dengan berbagai kebudayaan etnik maupun dengan berbagai sistem pemerintahan tradisional yang dalam banyak hal juga sedikit-banyak terkait dengan etnisitas.¹

Data etnografi dari berbagai suku bangsa menyebutkan betapa tugas pendidikan itu dikenali, meski tidak selalu diwadahi dalam suatu organisasi sosial tertentu, namun tugas pelaksana pendidikan itu diamanatkan oleh kebudayaan yang bersangkutan. Dapat disebutkan contoh bahwa pada suku bangsa tertentu di Irian, adalah tugas ibu untuk memberi pelajaran pertama dalam hal berburu dan meramu di hutan kepada anaknya. Pelaksanaan berbagai ritus peralihan (*rites de passage*) dari suatu status ke status selanjutnya dalam rute kehidupan setiap orang (misalnya dari anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari belum kawin ke kehidupan dalam pertalian perkawinan, dan lain-lain),

¹ Bahwa penataan institusional tersebut bisa tidak sepenuhnya mewakili etnisitas dicontohkan oleh tata sosial di masa Majapahit, di mana meski dapat dipastikan bahwa raja beserta keluarganya beserta sebagian terbesar rakyatnya adalah penyandang etnisitas Jawa, namun jelas-jelas dalam berbagai prasasti yang dikeluarkan di masa itu disebutkan adanya golongan penduduk yang non-Jawa, yang juga dilindungi oleh kerajaan.

biasanya terdapat tokoh tertentu yang bertugas memimpin ritus peralihan itu. Tidak jarang ritus itu didahului oleh suatu proses pendidikan tertentu pula. Dalam hasil-hasil kajian Antropologi dikenal adanya apa yang disebut sebagai *man's house* sebagai tempat/rumah untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang beranjak dewasa, di mana dilakukan berbagai upaya pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan untuk beralih status itu.

Ada kemungkinan bahwa tata sosial beserta pelaksanaan pendidikan di dalamnya di zaman prasejarah adalah mirip dengan keadaan-keadaan tertentu yang dijumpai pada suku-suku bangsa, terutama yang tidak tinggal di kota-kota. Sebenarnya memang keadaan pelaksanaan keperluan hidup seperti misalnya pendidikan itu, tak mungkin dapat diketahui dari data primer zaman prasejarah, karena sifat data prasejarah yang tak disertai data tertulis itu. Di zaman yang berikutnya, yaitu zaman sejarah, yang untuk Indonesia diawali dengan masa Hindu-Buddha dan kemudian masa Islam, berkat adanya data tertulis dari zaman itu sedikit banyak dapat diketahui bagaimana pendidikan dilaksanakan atau diatur di masa-masa itu.

Di masa Hindu-Buddha, dari data prasasti maupun sastra, dapat diketahui tentang adanya institusi pendidikan keagamaan yang mandiri di luar istana raja. Institusi itu, yang letaknya sering di daerah pegunungan, disebut dengan nama-nama seperti *kadewagurwan* dan *patapān*. Dalam karya-karya sastra sezaman diceritakan bahwa tempat-tempat pendidikan itu merangkap asrama, dan seringkali disantuni dan dikunjungi juga oleh keluarga raja. Istilah yang disebut pertama menyatakan bahwa tokoh utama yang menjadi sumber ilmu dalam institusi itu disebut *dewaguru*, yang menyiratkan makna “seorang guru yang mempunyai kualifikasi spiritual tinggi”. Adapun istilah kedua berarti “tempat bertapa”, yaitu tempat mengolah kemampuan spiritual melalui pengendalian fisik dan mental, yang sudah tentu juga mempunyai guru atau pelatih sebagai narasumber. Lingkungan studi dan pelatihan spiritual itu pulalah yang sering disebut dengan istilah *mandala*, yang mempunyai arti harfiah “lingkaran (berstruktur)”, yang tentunya terpusat kepada sang guru.

Dapat disimpulkan dari sejumlah data itu bahwa pada masa Hindu-Buddha tersebut, di Jawa khususnya, terdapat ‘spesialisasi’ pendidikan keagamaan, yang dilaksanakan dalam suatu institusi terpisah dari keraton, namun juga disantuni oleh pemerintahan kerajaan. Ada kalanya calon atau keluarga raja pun dididik di dalam institusi seperti itu untuk jangka waktu tertentu. Namun perlu pula diperhitungkan bahwa di samping institusi pendidikan spiritual-keagamaan itu istana sendiri melakukan pelatihan-pelatihan internal, artinya untuk warganya sendiri, dalam bidang-bidang yang lebih bersifat ‘keduniawian’, misalnya dalam seni sastra dan seni musik (Poerbatjaraka).

Karya-karya sastra masa Majapahit akhir juga mengungkapkan betapa seorang putra raja juga perlu melatih keunggulannya membuat karya seni rupa di atas kain. Semua upaya dalam keraton untuk penguasaan pengungkapan seni itu menyiratkan bahwa itu semua adalah bagian dari pendidikan pribadi demi citra peradaban.

Suatu hal lain yang patut diberi perhatian adalah adanya kelompok-kelompok sosial dengan kemahiran-kemahiran khusus, sudah tentu dengan pelembagaan pelatihan profesionalnya masing-masing. Ada beberapa golongan *pande* (pembuat benda-benda dari logam), seperti *pande māś*, *pande wsi*, *pande tamwaga*, yang masing-masing mengkhususkan penguasaan tekniknya untuk mengerjakan benda-benda dari emas, besi, dan tembaga. Ada kalanya suatu desa yang mempunyai keistimewaan dalam penguasaan pembuatan benda-benda logam itu diberi semacam otonomi, seperti pada *sīma ka-juru-guśaly-an*. Terkait dengan semua institusi penguasaan teknologi tertentu itu sudah tentu ada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan di dalamnya. Dapat diperkirakan bahwa cara pendidikan yang dilaksanakan adalah semacam proses pemagangan. Dalam kaitan ini dapat disebutkan pula bahwa di antara golongan profesi yang ada disebutkan dalam sumber-sumber tertulis masa ini adalah ahli bangunan (umum, rumah) yang disebut *undahagi*, dan ahli pembuat kapal yang disebut *undahagi lañcang*. Yang terakhir ini khusus disebut di masa Kadiri, sehingga dapat diperkirakan bahwa kemandirian keahlian dalam pembuatan kapal dicapai di masa tersebut. Berbagai macam profesi yang diakui berbeda-beda di masa Hindu-Buddha itu tentulah membutuhkan institusi pendidikannya tersendiri. Pendidikan dalam rangka pelengkapan citra pribadi mungkin dapat dipadankan dengan pendidikan informal, sedangkan pendidikan dalam rangka pembentukan keunggulan-keunggulan profesional dapat dipadankan dengan pendidikan non-formal. Adapun pendidikan spiritual-keagamaan dalam institusi-institusi tersendiri di luar keraton yang telah disebutkan di atas mungkin dapat dipadankan dengan pendidikan formal.

Suatu fakta yang perlu disebutkan mengenai masa Hindu-Buddha ini adalah adanya inisiatif di Indonesia untuk menyelenggarakan suatu pendidikan keagamaan yang berjangkauan antarbangsa dan antarnegara. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan mengenai agama Buddha yang diselenggarakan oleh kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatera yang dahulu disebut Suwarnadwīpa atau Suwarnabhūmi. Fa Hien (abad ke-5 M.) dan Hiuen Tsang (abad ke-7 M.) adalah dua musafir Cina yang memberikan catatan bahwa mereka lebih dahulu belajar tentang Buddhisme di Sriwijaya sebelum meneruskan perjalanan untuk belajar lebih lanjut di pusat studi agama Buddha di Nalanda di daerah Bengal, India.

Tradisi mengenai institusi-institusi seperti *patapān* dan *kadewagurwan* dari masa Hindu-Buddha tersebut di atas itulah yang kiranya berlanjut ke zaman Islam yang menyusul, yang kemudian dikenal dengan nama *pēsantren*.² Secara struktur organisasi sosial keberadaannya berlanjut, namun isi ajarannya sudah tentu berubah, dari substansi Hindu-Buddha ke Islam. Tak jarang para kyai pemimpin pesantren-pesantren itu membina hubungan dengan pusat-pusat pengetahuan Islam di luar negeri, terutama negeri Arab, dan mungkin juga Persia dan Turki.

² Istilah ini berarti “tempat *santri*”, dan kata “santri” diperkirakan berasal dari *śāstri*, yaitu “(siswa) yang mempelajari *śāstra*”, yaitu kitab-kitab yang berisi pengetahuan, yang dapat dikhususkan pada bidang-bidang tertentu, seperti ilmu memahat, ilmu pemerintahan, ilmu pementasan tari dan teater, bahkan ilmu bercinta.

Pada zaman berikutnya, yaitu zaman penjajahan Belanda terdapat upaya-upaya pendirian dan pelaksanaan lembaga-lembaga pendidikan tertentu sebagai berikut. Oleh pemerintahan kolonial pada waktu itu masalah pendidikan dianggap penting sehingga dimasukkan dalam Undang-Undang Tahun 1848, dan dianggarkan 25.000 gulden untuk sektor pendidikan. Pada tahun 1851 didirikan sekolah “dokter Jawa” yang didirikan untuk suatu alasan praktis, yaitu melatih kaum pribumi untuk menjadi “mantri cacar” karena ketika itu penyakit cacar sedang mewabah. Pada tahun 1851 itu juga dibuka dua *kweekschool* untuk melatih guru bantu bagi sekolah-sekolah modern sistem barat. Pembukaan lembaga-lembaga pendidikan itu, sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh Belanda, adalah untuk “membentengi Belanda dari *vulcano Islam*”. Pada tahun 1867 pemerintah kolonial membentuk departemen sendiri untuk masalah mendidikan, yaitu yang disebut Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri. Dari pengaturan itu tumbuhlah sekitar 300 sekolah pribumi di Jawa dan sekitar 400 di luar Jawa.

Kemudian pada tahun 1902 di Batavia dibuka sekolah kedokteran yang dinamakan *School tot Opleiding voor Indische Artsen* (STOVIA) dan sekolah sejenis didirikan pula pada tahun 1913 di Surabaya, dinamakan *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS). Pada tahun 1927 STOVIA ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi, dengan nama *Geneeskundige Hogeschool*, bertempat di Jalan Salemba 6, Jakarta. Ini menjadi cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian didirikan pula *Rechtskundige Hogeschool* yang menjadi cikal-bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian juga *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* yang menjadi cikal-bakal Fakultas Sastra (kemudian Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia. *Technische Hogeschool* yang didirikan pada tahun 1920 di Bandung merupakan cikal-bakal Institut Teknologi Bandung, sedangkan *Landbouwkundige Fakuliteit* merupakan cikal-bakal Institut Pertanian Bogor. Adapun *Bestuurs Academie* yang didirikan tahun 1930-an tentulah merupakan awal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang di kemudian hari diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara berlangsung pemerintahan kolonial itu, ada pula dua tokoh pemuka Indonesia sendiri yang merintis suatu sistem persekolahan tersendiri, yang secara teknis bersifat modern seperti sekolah-sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda, namun dalam semangat dan isi pelajaran sangat berjiwa ketimuran dengan membawa cita-cita kemandirian bangsa. Tokoh pertama adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat, atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lengkapnya nama perguruan itu adalah “*Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa*”. Sebagai tokoh pergerakan nasional, Ki Hajar Dewantara tidak ragu mencantumkan kata “*nationaal*” pada nama perguruannya, dan dengan itu yang dimaksudkannya tentulah kenasionalan Indonesia yang bersatu untuk mengupayakan kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan. Falsafah pendidikan yang dikembangkannya bertolak dari penekanan kepada pembentukan kemandirian dalam hubungan yang berkomunikasi hangat antara guru dan murid. Falsafah pendidikannya yang terkenal yang diungkapkan dalam bahasa Jawa berbunyi: “*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*”, sebagai pedoman perilaku bagi guru yang artinya: “di depan memberi teladan, di tengah menyemangati, dan mengiringkan dari belakang sambil memberi kekuatan”. Tokoh ini mendorong

diberikannya juga bahan-bahan ajar yang digali dari kebudayaan setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa kiprahnya dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah juga merupakan suatu gerakan budaya. Tercatat bahwa pada tahun 1942 cabang Taman Siswa berjumlah 199 sekolah tersebar di beberapa daerah, terutama di pulau-pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dengan pada waktu itu mempunyai sekitar 650 orang guru.³

Tokoh pendidikan terkemuka kedua yang perlu disebut adalah Engkoe Mohammad Sjafei yang pada 31 Oktober 1926 mendirikan “Perguruan Ruang Pendidik INS Kayutanam” di suatu desa kecil bernama Kayutanam di Sumatra Barat. Ada lima garapan utama yang dikembangkan dalam perguruan tersebut, yaitu: (a) kemerdekaan berpikir (dalam bentuk inovasi/kreativitas), (b) pengembangan ilmu pengetahuan, talenta/bakat (sebagai rahmat Tuhan), dan potensi diri, (c) kemandirian dan *entrepreneurship*, (d) etos kerja, serta (e) akhlak mulia (sebagai pengejawantahan dari agama, etika, dan estetika).⁴ Beberapa ungkapan yang bermuatan falsafah pendidikan dari tokoh ini antara lain adalah: “Jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis”; “Salah satu alat besar yang bisa mengubah keadaan kita dan menolong mengejar ketinggalan-ketinggalan adalah Pendidikan yang bersifat aktif positif dan belajar menurut bakat”; “Barang siapa yang mengeluh, ia kalah”; “Bangsa Indonesia tak dapat tidak akan mendapat manfaat yang sangat besar apabila juga berpikir kritis dan logis”; “Pelajaran pekerjaan tangan tidak hanya mengenai ketrampilan saja, banyak lagi sangkutannya dengan perkembangan jiwa si pelajar”, “Jadilah engkau, menjadi engkau”, dan lain-lain. Kiranya kutipan-kutipan itu dapat menggambarkan pendekatannya dalam melaksanakan upaya pendidikan. Dapat pula dikatakan bahwa Engkoe Mohammad Sjafei telah lebih dahulu menerapkan pendekatan pendidikan yang jauh di kemudian hari dirumuskan orang sebagai “*student-centered learning*” !

Demikianlah suatu latar singkat mengenai penyelenggaraan pendidikan di masa lalu di kawasan Indonesia, yang sudah tentu hanya terpusat pada jangkauan pusat-pusat tertentu yang ada dari zaman ke zaman, yang sudah tentu tidak dirancang semerata seperti sekarang ketika Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu mengusahakan agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan semerata mungkin untuk semua daerah.

2.2 Pendidikan Nasional Dewasa Ini

Paradigma pendidikan nasional sampai 2010 yang masih berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai pengejawantahan tuntutan reformasi, untuk memburu ketertinggalan bangsa dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan dunia global. Dari ‘Paradigma Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20’ (Ketua panitia kerja DPR RI tahun 1999-2004, Anwar Arifin) dapat dicatat beberapa butir sebagai berikut ini:

³ Periksa entri “Taman Siswa” dalam *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, dengan pemimpin redaksi Prof.Dr. Fuad Hassan, penerbit Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 2005. Jilid 10, halaman 5.

⁴ Periksa bahan tercetak berjudul *Institut Talenta Indonesia 2020: INSKayutanam 1926*, terbit 2006.

- a. Desentralisasi menggantikan paradigma sentralisasi, sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.
- b. Dengan desentralisasi ini, tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri pendidikan nasional, dan dalam hal ini pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- c. Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebagai satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, dikehendaki di setiap kabupaten dan kota.
- d. Sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan harus dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, untuk menghadapi tantangan globalisasi.
- e. Mengakomodasikan pendidikan jarak jauh dalam sisdiknas di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- f. Keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
- g. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, dan mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi. Perguruan tinggi juga dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan.

Sementara itu, dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 dikemukakan empat paradigma universal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. **Pemberdayaan manusia seutuhnya**, merupakan fondasi pendidikan yang menyiapkan keberhasilan peserta didik sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), elemen sistem sosial yang saling berinteraksi dan saling mendukung (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).
- b. **Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik**. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, semenjak lahir sampai akhir hayat, yang diselenggarakan secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan

- fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*)
- c. **Pendidikan untuk semua.** Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar adalah bagian hak asasi manusia dan hak setiap warga negara. Usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil, serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.
 - d. **Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B).** Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik, bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain, dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan.

2.3 Catatan tentang Pendidikan Nasional Dewasa Ini

2.3.1. Kebijakan Pendidikan

Berbagai kebijakan pendidikan telah diambil dan dilaksanakan dengan tujuan memperoleh hasil pendidikan yang lebih baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Antara lain desentralisasi, standardisasi, peningkatan anggaran dan sebagainya. Sayangnya kebijakan ini terkesan kurang memperhatikan kesesuaian dengan keadaan, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan paradigma masa yang berlaku sekarang. Demikian pula pemanfaatan peningkatan anggaran terkesan tidak disertai dengan perencanaan penggunaan yang terpadu secara menyeluruh.

2.3.2. Pelaksana dan Pelaksanaan Pendidikan

Berbagai lembaga pendidikan telah mempunyai tenaga pengajar yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Di samping pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pendidikan, yang tidak kurang pentingnya adalah kesadaran akan fungsinya sebagai pendidik dan kesungguhan melaksanakannya.

Tercakup dalam hal ini antara lain sikap dan tata nilai yang mempengaruhi disiplin dan kejujuran. Namun, tidak sedikit pula yang masih jauh dari ini, baik kuantitas maupun kualitasnya sebagai pendidik. Ini tercermin antara lain dalam berbagai kecurangan dalam pelaksanaan ujian, dan cara melaksanakan pembelajaran. Semua ini sangat mempengaruhi kualitas hasil pendidikan yang diperoleh. Segala kekurangan ini terutama disebabkan oleh kesejahteraan guru yang kebanyakan masih jauh dari yang seharusnya. Banyak orang yang berpotensi sebagai pendidik enggan menggeluti profesi ini.

Kenyataan ini mungkin pula terjadi, karena terbaikannya pengawasan dan evaluasi yang teratur dan berkesinambungan atas pelaksanaan pendidikan itu. Sebagai contoh, masih banyak pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada kuantitas kelulusan ujian, termasuk ujian nasional, daripada pengutamaan pada kualitas penguasaan ilmu yang diajarkan. Fenomena ini tidak termonitor dengan baik.

Dua contoh kecil ini hanya sekelumit contoh yang menyimpulkan, bahwa pelaksana, pelaksanaan pendidikan kita dewasa ini belum seperti yang seharusnya diharapkan.

2.3.3. Hasil Pendidikan

Berbagai catatan positif dapat dikemukakan mengenai hasil pendidikan kita selama ini, antara lain sebagai berikut ini. Keberhasilan banyak sarjana lulusan perguruan tinggi kita dalam berbagai profesi, ataupun bidang akademis menunjukkan kualitas berbagai perguruan tinggi kita. Demikian pula halnya dengan keberhasilan mereka dalam melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi terkenal di luar negeri. Hal yang sama diikuti pula oleh lulusan pendidikan menengah kita.

Berbagai lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi telah berkiprah dengan baik pula di berbagai profesi atau jabatan, walaupun tidak terkait dengan keahlian bidang pendidikannya. Ini menunjukkan, bahwa selama pendidikan mereka tidak hanya memperoleh ilmu, melainkan juga memperoleh kearifan, memiliki sikap dan menyerap nilai-nilai yang ditumbuhkan selama belajar, baik melalui hakikat ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, maupun melalui proses belajar atau kehidupan yang bermakna yang mereka alami dalam masyarakat kampus atau sekolah mereka.

Berbagai prestasi keilmuan telah ditunjukkan siswa dalam berbagai kontes keilmuan yang diadakan setiap tahun, baik dalam lingkup nasional, regional, ataupun internasional, tetapi tidak dapat dikatakan menunjukkan pula keberhasilan pendidikan kita. Ini adalah prestasi sekelumit siswa pandai yang dilatih secara khusus dan intensif dalam jangka waktu tertentu. Untuk ini dilakukan upaya yang luar biasa, jauh melebihi yang diberikan pada anak-anak yang justru memerlukan bantuan belajar. Ini merupakan kejanggalan dalam paradigma pendidikan yang adil.

Pengalaman menunjukkan, bahwa banyak lulusan sekolah menengah termasuk mahasiswa yang tahu banyak, tetapi tidak paham apa yang mereka ketahui. Ini menunjukkan motivasi belajar para siswa lebih pada mencari ijazah daripada mencari ilmu atau pengetahuan.

Berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat, seperti banyaknya korupsi dan KKN, serta maraknya tawuran dan kekerasan di berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan ketidakberhasilan pendidikan kita menanamkan nilai-nilai luhur dan sikap terpuji di setiap jenjang pendidikan. Mahasiswa lebih suka mengutarakan pendapat melalui unjuk rasa daripada menyampaikan secara santun hasil analisis dan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat mereka rumuskan atas sesuatu permasalahan. Ini adalah suatu contoh lain tentang ketidak-berhasilan tersebut.

Ini mengungkap dengan jelas belum sepenuhnya terpenuhi apa yang diungkapkan dalam paradigma pendidikan nasional: pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,dst.

2.4. Relevansi Faktor Geo-demografi bagi Paradigma Pendidikan

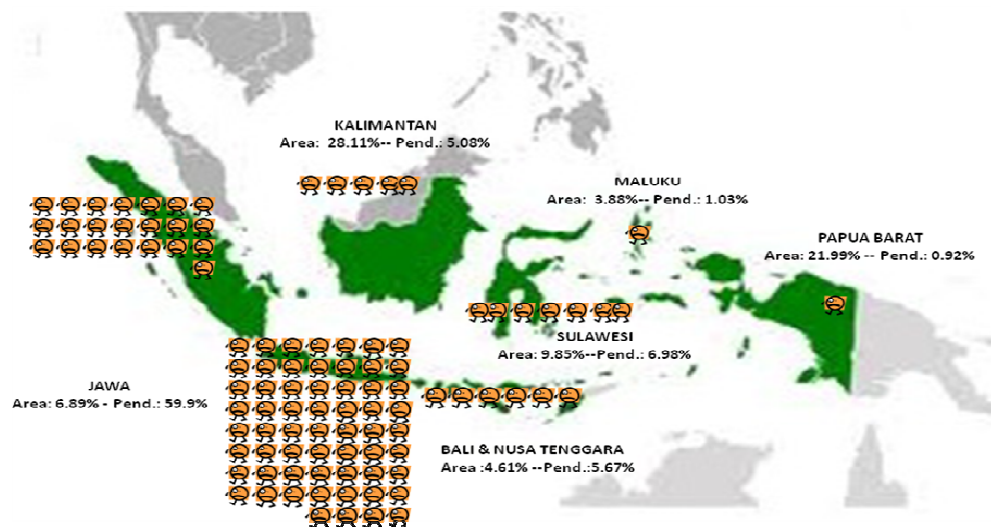
2.4.1. Profil Demografis

Wilayah Republik Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan luas keseluruhan 1.900.000 km persegi.⁵ Indonesia pada awal abad XXI merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, namun mempunyai sekitar 500 sukubangsa dengan bahasanya masing-masing. Pembahasan tentang kebhinnekaan masyarakat Indonesia dalam dimensinya yang faktual harus bersedia menghadapi suatu besaran yang berdimensi geo-demografis, geo-ekonomis dan bahkan juga geo-politik yang paradoksal. Pluralitas dan heterogenitas dari kebudayaan dan masyarakat di Indonesia itu dalam kenyataannya juga bertumpang-tindih dengan ketidak-seimbangan dalam struktur demografis dan potensi kinerja ekonomis dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 234,2 juta jiwa.⁶ Data tahun 2004 yang belum berubah kuantitatif signifikan pada tahun 2010 memperlihatkan komposisi sbb.: Di pulau Jawa yang merupakan 6,89% luas wilayah daratan Indonesia berkumpul 59,9% penduduk Indonesia (kira kira 115 juta orang), sementara Papua Barat yang merupakan 21,99% luas wilayah Indonesia dihuni oleh 0,92% penduduk (Turner, 1997: 49).

Selengkapnya adalah sbb.:

⁵ Jurnal Kementerian Luar Negeri RI, 27 Mei 2004: pada tahun 1987 diketahui bahwa 5.407 pulau memiliki nama, pada tahun 2004 ada 7.810 pulau yang bernama. Selebihnya adalah pulau tidak bernama.

⁶ <http://www.antaraneews.com/berita/1277272415/penduduk-indonesia-diperkirakan-234-2-juta-jiwa> (21 Juli 2010)



Gambar 1. Ketidak-seimbangan Struktur Demografis

2.4.2. Konsekuensi Geo-demografis

Pulau Jawa telah memperoleh reputasi sebagai pusat transit dan komunikasi semenjak penjelajah-penjelajah asing yang pertama mendarat di Nusantara, sehingga tidaklah mengherankan jika secara ekonomi dan politik, pulau Jawa lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Akibat penjajahan yang “fokus” pada pulau Jawa inilah maka tercipta suatu fenomena yang lebih mengutamakan adanya pembangunan di pulau ini dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, terutama semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada akhirnya, kita menghadapi ketimpangan besar dalam alokasi dan distribusi dari berbagai sumber-daya alam serta energi, yang pada gilirannya akan berpengaruh langsung pada tingkat kecerdasan rakyat maupun usaha pendidikan nasional. Konstelasi seperti itu mula-mula merupakan akibat dari perkembangan sejarah. Kesuburan pulau Jawa nampaknya merupakan faktor pertama yang membuatnya mampu mendukung suatu hunian yang bersandar kepada perekonomian agraris, baik sebagai pertanian rakyat maupun sebagai perkebunan. Akibatnya, pembangunan infra struktur setempat seperti menjadi suatu konsekuensi yang otomatis. Sehingga ketika Indonesia mulai terseret ke dalam proses industrialisasi pada awal abad XX, pulau Jawa juga langsung nampak lebih siap untuk menyikapinya.

2.4.3. Tantangan bagi Pendidikan Nasional

Kesenjangan geo-demografis antara pulau Jawa dan pulau-pulau Indonesia lainnya sudah merupakan persoalan besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Kesenjangan sosio-geografis antara pulau Jawa dan pulau-pulau Indonesia lainnya dapat difahami sebagai kesenjangan dalam hal kepadatan penduduk, kemajuan pendidikan dan tingkat kemakmuran, serta keterlibatan dalam komunikasi serta telekomunikasi nasional maupun internasional. Kesenjangan antarpulau itu sebenarnya juga dapat diamati di antara pulau-pulau Indonesia lain selain pulau Jawa.

Di samping itu, posisi Indonesia yang sedemikian strategis karena memiliki kedekatan geografis dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini,

dan Australia juga memberikan tantangan tersendiri, terutama terhadap daerah atau provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Jika gagal menjalin hubungan komunikasi efektif antardaerah di wilayah nusantara, tidak mustahil akan dimanfaatkan negara lain yang dekat secara geografis untuk mengambil keuntungan. Proksimitas geografis itu pada gilirannya menentukan tingkat intensitas komunikasi dan telekomunikasi antar-daerah di Indonesia, yang dapat diukur dari frekuensi hubungan telepon di antara penduduk dari berbagai daerah.

Masa depan Indonesia yang bersatu, stabil dan seimbang karenanya akan banyak tergantung dari usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menyetarakan mutu sumberdaya manusianya dalam skala nasional. Kepincangan dalam aspek ini akan dengan mudah menjadi sumber ketidak-puasan yang disebabkan oleh perbedaan kesempatan hidup makmur dan bermartabat, yang pada gilirannya akan bermuara dalam letusan-letusan sosial-regional.

Oleh karena itulah maka kebijakan pendidikan Indonesia harus memperhatikan keanekaragaman, dengan tetap memperhatikan secara seksama kesenjangan sosial budaya yang terjadi saat ini, sehingga kelak dapat tertwujud sistem dan program pendidikan yang adil dan merata, sesuai dengan amanat UUD NKRI 1945. Usaha penyetaraan serta penyerasian pendidikan karenanya memang akan menjadi padat biaya, tetapi itu adalah risiko dari dua faktor geo-demografis yang dihadapi Indonesia: pertama adalah keanekaragaman demo-kultural yang diskrepan dan tersebar dalam struktur geo-maritim. Kedua adalah desakan untuk mengejar ketertinggalan dalam banyak hal, jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang mempunyai dimensi besaran politik serupa dengan Indonesia.

2.5. Sistem dan Kategorisasi Pendidikan

Sistem pendidikan nasional dewasa ini terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping itu sekarang sedang gencar digalakkan pendidikan anak usia dini, yang mencakup kelompok bermain dan taman kanak-kanak.

Adapun jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan nonformal untuk saling melengkapi dan memperkaya. Untuk jalur pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Mulai dari SMP, para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat, atau ke jenjang untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya, yaitu dari SMP ke SMK atau ke SMA, dari SMA ke S1 atau ke pendidikan vokasi, (D3 dan D4), dari S1 ke pendidikan profesional (dokter, apoteker, notaris, dsb), atau ke S2, atau ke pendidikan profesional setingkat S2.



Dari pendidikan profesi seorang dapat melanjutkan ke jenjang S2 untuk diteruskan ke S3, atau melanjutkan ke pendidikan spesialis.

Namun, sering dikaburkan falsafah pendidikan akademis dan pendidikan profesional, terutama pada pendidikan vokasi. Biasa saja setelah pendidikan vokasi D3 yang tiga tahun, dengan menambahkan sejumlah kredit yang setara dengan kuliah setahun, dianggap sama dan diberi ijazah S1. Ini seharusnya tidak boleh terjadi.

2.6. Peraturan Perundang-undangan

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua peraturan hukum selalu mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di bidang pendidikan, peraturan perundang-undangan yang utama yakni Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari Undang-Undang tersebut diturunkan Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, dan turunan lainnya. (Lihat Lampiran).

BAB III: Peluang dan Tantangan Pendidikan Abad XXI

3.1. Karakteristik Abad XXI

Abad XXI baru berjalan satu dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran, dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tidaklah berlebihan bila dikatakan kemajuan ilmu tersebut dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer. Dengan piranti mana kemajuan sains dan teknologi terutama dalam bidang *cognitive science*, *bio-molecular*, *information technology* dan *nano-science* kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan yang mencirikan abad XXI. Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad XXI adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia.

Bila disarikan, karakteristik abad XXI adalah:

- a. Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama terhadap: pemanasan *global energy*, pangan, kesehatan, lingkungan binaan, mitigasi.
- b. Dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama terhadap: ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan, industry, komunikasi.
- c. Ilmu pengetahuan akan semakin *converging*, berikut implikasinya, terutama terhadap: penelitian, filsafat ilmu, paradigm pendidikan, kurikulum.
- d. Kebangkitan pusat ekonomi dibelahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap: politik dan strategi ekonomi, industry, pertahanan,
- e. Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia kearah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap: kualitas sumber daya insani, pendidikan, lapangan kerja,
- f. Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama terhadap: kekayaan dan keanekaan ragam budaya, pendidikan kreatif, entrepreneurship, technopreneurship, rumah produksi.
- g. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan Teknosains berikut implikasinya, terutama terhadap: karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media.
- h. Perubahan paradigma Universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”. Terdapat kecenderungan semakin meningkatnya investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi/desain yang memberikan

dampak pada pengembangan industri dan pembangunan ekonomi dalam arti luas.

3.2. Kompleksitas Abad XXI

Masalah yang dihadapi manusia pada abad XXI semakin kompleks, saling kait mengkait, cepat berubah dan penuh paradoks. Umumnya kaum futuris mengkaitkan pertumbuhan penduduk dunia yang bergerak secara cepat sebagai pemicu. Bila pada tahun 2010 penduduk dunia sebesar 6.9 milyar, maka dalam waktu 2050 oleh United Nations Population Division diperkirakan mencapai 9.2 milyar orang, ini berarti dalam masa empat puluh tahun akan terjadi penambahan sebesar 2.5 milyar penduduk. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia luar biasa; mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan. Penduduk Indonesia yang sebesar 234,2 juta merupakan 3.38% penghuni planet ini mengalami pertumbuhan sekitar 1.14% per tahun.

Masalah tersebut menjadi kompleks bila dihubungkan dengan kondisi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena menyangkut sistem dan nilai yang berlaku antara bangsa, sukubangsa, dan individu. Tuntutan tersebut berimplikasi pada daya dukung alam yang lama kelamaan tak akan mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap akan ‘menggangu’ keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup dalam peradaban abad XXI dijadikan isu untuk mengubah paradigma lama yang terlalu menekankan pada ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan, seni demi seni, kearah paradigma baru yang lebih mengedepankan makna dan nilai pengembangan yang bersifat berkelanjutan.

Sama halnya dengan dunia Ilmu Pengetahuan, kehidupan ekonomi abad XXI mengalami konvergensi dari ekonomi “kelangkaan” kearah ekonomi yang dikendalikan oleh informasi, di mana 93% seluruh pengetahuan di dunia ini sudah didigitalkan. Lebih dari 80% kekayaan negara negara industri maju dibangkitkan oleh informasi dan usaha jasa yang juga merupakan industri di mana bahan mentahnya bukan berupa tanah, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku alam melainkan pengetahuan (Westland, 2002). Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara *online*, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Angka-angka itu berubah dari menit ke menit, seiring dengan gejolak yang terjadi dalam ekonomi perdagangan, politik, sosial, bahkan oleh ‘ulah’ tokoh dunia. Dalam kondisi pasar global semacam ini, maka apa yang terjadi di satu negara, pengaruhnya akan terasa di negara lain.

3.3 Tantangan Abad XXI

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saling terkait mengembangkan ekologi kependidikan dan kesadaran berkomunikasi, bernegara dan berbangsa. Walaupun perbatasan alami negara tradisional masih berlaku tetapi dengan tak sepenuhnya disadari muncul sekat baru berujud tepian-tepian teknologik dan sains. Tidak dapat dipungkiri bahwa

penyekatan itu menumbuhkan citarasa kebangunan dan kebanggaan, karena identitas yang melekat sebagai hamba berpengetahuan. Kehormatan itu, tentu saja tidak datang sendiri, digapai dengan usaha berat dan konsisten melalui penguasaan ilmu pengetahuan, dengan inovasi teknologi dan penciptaan keagungan budaya pendidikan. Entitas bangsa lain lalu melihat kelompok tersebut sebagai mercu suar kehidupan abad ke 20 yang memancarkan kemashalatan, sinar kemanusiaan yang menjadi pedoman arah. Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada saat bersamaan membangkitkan mazhab ekonomi, sinar itu menjadi redup. Muka pengagumnya berpaling ke arah lain yang lebih menjanjikan peradaban zamannya.

Hampir semua bangsa mendekatkan diri dengan penguasa pasar global, yang ditandai dengan atribut penguasaan teknologi dan inovasinya. Mereka yang tidak dapat meraihnya harus rela tergeser ke pinggiran dan tertinggal di belakang.

Bersamaan dengan pembaharuan hidup berkebangsaan dengan ekonomi dan sosial sadar-pengetahuan kita membangun manusia berdaya cipta, mandiri dan kritis tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk diajak maju menikmati peluang abad ini. Dalam hubungan ini kita ditantang untuk mencipta tata-pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan seperti layaknya warga abad XXI. Mereka harus terlatih mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih kekuatan fisik konvensional. Tentu saja dalam memandang ke depan dan merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyataan yang mengikat kita dengan realita kehidupan. Indonesia masih menyimpan banyak kantong-kantong kemiskinan, wilayah kesehatan umum yang tidak memadai dan kesehatan kependudukan yang rendah serta mutu umum pendidikan yang belum dapat dibanggakan. Ini memerlukan perhatian dan upaya yang serius dan taat asas.

Sederet falsafah dan kebijakan tradisional, yang berkembang dalam kehidupan kita, terangkum sebagai budaya bangsa, telah ikut menerapkan dan merawat lingkungan hidup alami. Namun masuknya budaya asing, yang kurang empati terhadap kehidupan lingkungan telah dapat mencabut akar kebajikan itu dari lingkungan tanpa daya kita untuk mencegahnya. Nurani dan akal sehat haruslah menjadi ciri dalam pendidikan dalam abad yang tak lagi mengenal batas geografi seperti abad XXI ini.

3.4. Modern, Post-modern, dan Modernisasi

Abad XXI merupakan penerusan dari abad ke XX, yaitu era di mana istilah modern untuk pertama kali didengarkan, yang kemudian mendasari apa yang terjadi pada abad sekarang. Istilah “modern” menunjuk aspek kekinian, sedangkan istilah “modernisme” adalah aliran pemikiran yang mengacu kepada sikap kritis-ilmiah yang liberal. Spirit modern adalah semangat yang meyakini bahwa kebenaran ilmiah adalah satu-satunya asas yang bersifat universal yang dapat mengantarkan manusia mencapai aktualisasinya.

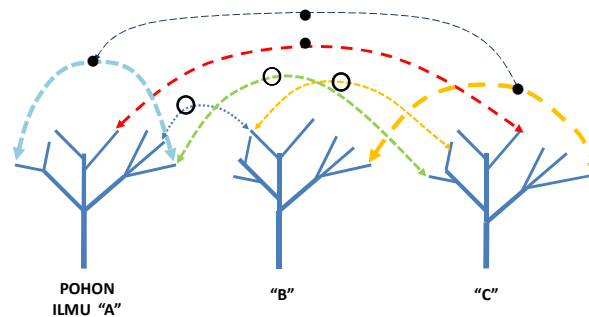
Dalam kaitannya dengan modernitas, ilmu-ilmu alamiah dijadikan sebagai ujung tombak dalam menguak rahasia alam. Kelompok ilmu tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam

berbagai rancang-bangun dalam berbagai sektor. Sektor yang terpenting adalah industri dan pertahanan. Pengaruhnya terhadap kehidupan modern yang terlihat pada masa itu, adalah timbulnya keinginan untuk mendayagunakan pengetahuan bagi kemajuan material. Modernitas memang membawa dunia Barat mengalami kemajuan fisik yang luar biasa. Dalam segala bidang semangat modernisasi diterapkan. Individualisme dan kebebasan diusung sebagai asas berkompetisi dalam kegiatan ekonomi dan politik.

Permasalahan sosial-budaya mencuat ke permukaan; tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga pada agama, seni, dan filsafat. Hubungan antara Agama dengan Ilmu Pengetahuan yang dahulunya bersifat konfirmatif mendapat ujian berat akibat semakin berpengaruhnya teori Darwin. Kemudian muncul tantangan-tantangan terhadap teori itu. Di bidang Seni dan Humaniora, bila pada dulunya seni diusung untuk meningkatkan derajat moralitas, maka seni modern semata-mata adalah ungkapan pribadi. Laksana karya ilmiah, seni adalah ideosinkrasi si seniman. Kebalikannya, desain yang lahir oleh perpaduan seni dan enjiniring semakin diberi peran untuk memberdayakan kejayaan industri. Begitu pula filsafat, yang sejak Abad Pencerahan dianggap sebagai pemandu untuk menggali asal usul “ada” (ontologi), rahasia kehidupan dan alam realitas, bahkan pengetahuan ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib bagi setiap calon sarjana, namun setelah mereka memisahkan fisika dari metafisika, filsafat tidak dijadikan mata kuliah wajib, karena mereka meyakini upaya mencari kebenaran yang empiris, yang obyektif, dan universal itu mempunyai ranah perkembangan tersendiri.

Wacana *post-modern* yang melatar belakangi filsafat ilmu abad XXI, muncul untuk pertama kalinya di bidang seni, sebagai reaksi terhadap aliran modernisme yang dianggap semakin deterministik, mengagung-agungkan rasionalitas, pola berpikir yang sistematis, yang terlalu mengandalkan kekuatan teori universal dalam berkarya. *Post-modern* tidak memiliki makna yang pasti, karena derivasinya diangkat dari keyakinan adanya relativitas dalam segala hal. Aliran ini masih mempercayai proyek modernitas sebagai pelita peradaban dan budaya masa mendatang, tetapi mereka menyangsikan apa yang diyakini kaum modernis. Menurut paham ini, pengetahuan dan etika relatif terhadap paradigma yang berlaku, sehingga tidak ada aturan yang baku dalam melihat kebenaran obyektif dan narasi budaya global. Pengaruh aliran *post-modern* memang lebih nampak di bidang ilmu-ilmu budaya seperti: sastra, linguistik, sosiologi budaya, arsitektur, seni rupa dan musik, tetapi sebenarnya juga berimbas pada ilmu-ilmu alami dan sosial khususnya dalam menyikapi gejala kompleksitas dan *chaos* yang ditemui dalam fenomena alam, kehidupan sosial di alam globalisasi.

Sampai saat ini, spirit modernisme dan post-modernisme masih berlangsung. Sebagaimana lazimnya dalam perubahan paradigma, kritik yang pro dan kontra dalam tataran ontologis masih terjadi. Terlepas dari pro dan kontra dari kedua paham di atas, kenyataan menunjukkan kedua pendekatan tersebut masih berjalan berdampingan dalam menggali pengetahuan (*knowledge inquiry*), bahkan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terjadi hibrida seperti terlihat dalam diagram di bawah ini.



Gambar 2. Hibrid Pengetahuan/IlmU/Teknologi

3.5. Teknologi dan Budaya Abad XXI

Dewasa ini kita mengalami gelombang baru. Tatkala para peneliti menukik lebih jauh ke masalah alam pikiran (*'mind'*), genetika, dan *fractal*, perspektif keilmuan bergeser ke arah dimensi yang tidak kasat mata. Melalui tahapan yang berjenjang, penelitian yang rumit ini kemudian memunculkan pengetahuan baru. Seperti gayung bersambut ilmu-ilmu tersebut saling bergantung satu sama lain sehingga memunculkan teknologi internet, robotika, bioteknologi, dan teknologi lain yang diperlukan bagi berbagai kebutuhan hidup antara lain: kesehatan, pertanian, pertahanan, bisnis, komunikasi, transportasi, sport, pendidikan, rumah tangga, hiburan dll.

Dalam dunia komunikasi, selain kita dapat melakukan interaksi *real time*, kita seolah-olah berada dalam ruang nyata, meskipun sebenarnya ruang itu maya. Dalam mengisi waktu senggang dan hiburan, penyajian lewat DVD, iPod, iPad, VR, Hologram, dan Game kita diajak berkelana di dunia maya. Berbeda dengan istilah budaya dalam pengertian antropologi yang dikondisikan oleh kesadaran ruang dan waktu nyata, budaya maya bergantung pada situasi masing-masing pribadi. Di antara teknologi di atas yang paling memberikan dampak pada budaya adalah berbagai perangkat komunikasi elektronik.

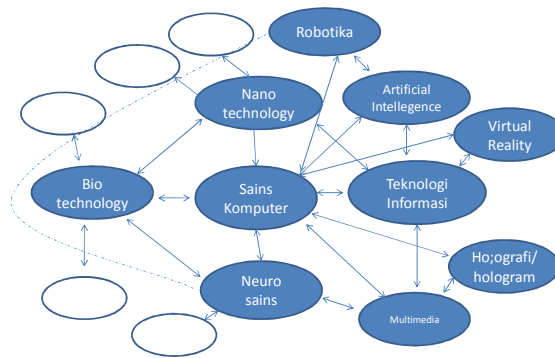
Fenomena ini membawa perubahan besar dalam kegiatan ilmiah. Pertama, terjadinya konvergensi aktifitas antara saintis yang bergulat dalam ranah teoritis dengan teknolog yang bekerja di ranah praksis. Kedua, tumbuhnya lembaga atau institusi riset yang mengkhususkan diri dalam melakukan R&D. Ketiga, tumbuhnya sinergi antara lembaga keilmuan termasuk perguruan tinggi dengan industri untuk memproduksi produk canggih berbasis komputer. Karena kemampuannya yang canggih, efisien, efektif, serta tidak menuntut infra struktur yang kolosal, dan nilai inovasinya yang berbobot pengetahuan, maka himpunan ilmu itu oleh bangsa-bangsa industri maju dipergunakan sebagai strategi dalam pengambilan berbagai keputusan politik, ekonomi dan pertahanan yang berskala internasional. Dari sanalah kemudian lahir globalisasi seperti yang kita kenal dewasa ini.

Teknologi Informasi yang berbasis digital meliputi komputer, komunikasi satelit, robotika, *videotext*, televisi kabel, e-mail, permainan elektronik (*electronic games*), dan mesin perkantoran berbasis elektronik. Sekalipun kehadiran teknologi informasi ini berkat penelitian dan kiprah sains dasar, tetapi karena dalam beberapa segi kemampuan operasionalnya mampu mengungguli kemampuan otak manusia, maka hampir seluruh instrumen untuk penelitian, kerja profesional dalam berbagai bidang keilmuan telah memanfaatkan teknologi digital.

3.6. Paradigma Keilmuan Baru

Sebagaimana dikemukakan di depan tentang kemampuan konektivitas, berkat teknologi ini ilmu pengetahuan semakin mengerucut, menyatu bahkan menghasilkan hibrida. Hal tersebut dirintis oleh para fisikawan yang mulai berspekulasi mencari teori umum yang dapat menerangkan hubungan tentang adanya empat gaya (gravitasi, elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah) ke dalam teori string atau teori yang dapat menerangkan segala masalah (*Theory of Everything*). Dalam konteks ini, beberapa teknologi masa depan yang sedang dan akan mengubah paradigma adalah:

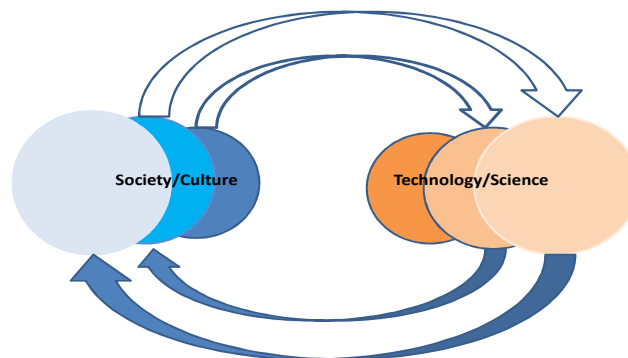
- a. **Nanosains dan Teknologi nano.** Pada saat yang bersamaan dengan perintisan teori DNA, fisikawan Feineman mengutarakan gagasan tentang inti dari proses manipulasi materi atom dan molekul dengan menggunakan kehandalan materi itu sendiri. Dengan bantuan teknologi pemberdayaan yang sesuai dengan ukuran nano tersebut, diharapkan masalah gravitasi tidak menjadi kendala, sedangkan tegangan permukaan dan gaya tarik bekerjanya menjadi semakin signifikan.
- b. **Neurosains kognitif.** Istilah neurosains kognitif berasal dari "kognisi" yaitu proses mengetahui, dan "neurosains" yaitu ilmu yang mempelajari sistem saraf. Ilmu ini berupaya untuk melokalisir bagian-bagian otak sesuai dengan fungsinya dalam kognisi. Oleh karena itu fokusnya adalah otak dan sistem saraf yang berkaitan dengan fungsi otak. Ilmu ini pada dasarnya berupaya untuk mengungkap struktur dan fungsi dari otak manusia.
- c. **Teknologi pencitraan.** Studi tentang optik mengantarkan pada penelitian yang lebih jauh mengenai pencitraan. Di antara teknologi pencitraan yang paling memberikan sumbangan besar pada kehidupan abad XXI adalah serat optik, hologram, dan Realitas *Virtual*.
- d. **Hologram/Holografi.** Hologram adalah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi-informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau adegan.
- e. **Teknologi Informasi.** Dunia kehidupan dan pendidikan khususnya pada abad XXI ini telah dicirikan oleh hadirnya teknologi informasi, yang dampaknya telah mengubah berbagai sendi kehidupan yang bersifat mendasar. Dalam kaitannya dengan dunia akademis, sains dan teknologi tersebut di atas telah membuka wawasan baru tentang realitas alam, manusia (kemampuan dan keterbatasannya) serta makna kehidupan sosial budayanya, sehingga mendobrak dominasi filsafat ilmu reduksionistik pada tataran ontologis, epistemologis maupun metodologis.



Gambar 3. Konvergensi Teknologi

3.7. Tekno-Sains

Berkat teknologi baru yang dihasilkan oleh gugus (*cluster*) sains di atas, lahirlah internet, komunikasi elektronik nirkabel (*mobile communication*), multimedia dan berbagai teknologi derivasinya ke dalam dunia kehidupan nyata: sosial politik, ekonomi, budaya dan keamanan, maka dunia ilmu pengetahuan larut dalam kehidupan nyata yang dikondisikan oleh dimensi sejarah. Berbeda dengan abad ke XX dimana Sains, Teknologi dan Seni yang masih terfragmentasi, mulai abad ini berbagai ilmu mulai mengarah pada konvergensi. Dalam rangka konvergensi itu, muncullah tekno-sains yaitu ilmu yang dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi.



Gambar 4. Tekno-Sains

3.8. Budaya Internet dan *Cyber Society*

Sejak dimulainya wacana untuk menghubungkan pengguna komputer satu dengan lainnya yang hanya digunakan di lingkungan perguruan tinggi ternama, perkembangan internet sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan itu pertama

ditunjang oleh penemuan sains material, sains pencitraan, dan kedua oleh bahasa program yang canggih sehingga memungkinkan pengguna internet melakukan berbagai kegiatan di dunia maya secara interaktif antara: dirinya sendiri dengan komputer atau dengan sesama pengguna lain; secara perorangan atau kelompok; telah mengenal atau belum; di tetangga atau di benua lain; dalam durasi waktu yang tak terbatas. Ini berarti pengalaman yang didapatkan hampir sama dengan kehidupan nyata sehari-hari. Ketika internet diperkenankan untuk digunakan dalam dunia bisnis, kemampuannya berkembang luar biasa. Pengertian bisnis tidak terbatas pada hal hal yang berkaitan dengan perdagangan dalam pengertian yang sempit, tetapi semua kegiatan, instrumen, institusi, produksi, distribusi dan konsumsi yang dilaksanakan oleh korporasi, konglomerat, organisasi termasuk perguruan tinggi. Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya internet. Internet mempunyai pengaruh yang besar atas perkembangan ilmu pengetahuan, dan pandangan dunia.

Konvergensi antara internet dengan komunikasi selular (*mobile phone*) yang disertai oleh semakin tinggi dan canggihnya kapasitas operasionalnya, kemudian didukung oleh berbagai inovasi perangkat keras yang semakin menubuh dengan diri kita, maka suka atau tidak, internet mulai menggantikan moda komunikasi kehidupan sosial (ekonomi, politik, budaya), dan bahkan dapat mengubah system dan nilai budaya serta dimensi spiritual, berikut dengan implikasi baik buruknya.

3.9. Globalisasi dan Pendidikan

Pada mulanya globalisasi disulut oleh niat negara-negara industri maju mengkonsentrasikan upaya pada “Research & Development” untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu pengetahuan mutakhir sehingga dengan demikian mereka mendapatkan peluang untuk memenangkan pasar dengan keunggulan kompetitifnya. Kemudian mereka alihkan teknologi industri yang kokoh yang mereka kembangkan dengan infra-strukturnya yang padat investasi itu ke negara-negara ‘berkembang’ melalui apa yang disebut “transfer/alih teknologi”. Maka globalisasi dalam konteks ini menjadi bermakna: kompetisi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Implikasinya adalah munculnya istilah “ekonomi pengetahuan”, yaitu ekonomi yang dasarnya dan atau produknya adalah pengetahuan. Hal ini pada umumnya melibatkan kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian

3.10. Budaya dan Karakter Bangsa: Tantangan Nasional

Tak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki modal fisik (*physical capital*) awal yang kaya. Dengan luas laut terluas (5,8 juta km²) dan jumlah pulau terbanyak (17.508), Indonesia memiliki potensi sumber daya alam luar biasa. Bayangkan, Indonesia adalah tempat hidup bagi 37% spesies dunia, 30% hutan bakau dunia, dan 18% terumbu karang dunia. Hutan tropis Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Congo. Belum lagi hasil tambang, baik berupa minyak dan gas bumi maupun sumber-sumber mineral lainnya. Produksi minyak Indonesia pernah mencapai rata-rata 1685 ribu barrel/hari pada 1977 (Hertzmark, 2007).

Namun, kekayaan ini semakin hari semakin terbangun akibat penghancuran sistematis. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan sesaat yang bersifat sektoral, fragmentatif, dan tak mengindahkan keberlanjutan menjadi penyebab kehancuran ini. Kerusakan sumber kekayaan alam terus terjadi akibat eksploitasi alam terencana yang dilakukan negara ataupun akibat pembiaran kerusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang tengah mengejar keuntungan jangka pendek, dan tak peduli pada dampak lingkungan jangka panjang.⁷

Dengan kata lain, yang kita harapkan adalah adanya perubahan sistemik menyeluruh, yang mampu menerobos kebuntuan yang terjadi saat ini. Perubahan ini bukan sekedar berubahan tambal sulam seperti misalnya sekedar menambah anggaran atau mengganti kurikulum yang kini berlaku atau sekedar meningkatkan kapasitas pelaksana pendidikan orang per orang, tetapi lebih jauh dari itu, yakni peningkatan modal sosial bangsa yang ditandai dengan adanya pertumbuhan jejaring pelaksana pendidikan yang saling-bekerjasama memanfaatkan segala potensi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan rakyat banyak.

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negeri ini sebenarnya telah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dalam pembukaan UUD disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum, [dan] mencerdaskan kehidupan bangsa.” Bahkan dalam perkembangannya, amanat Konstitusi dalam Perubahan ke IV (10 Agustus 2002) diperinci menjadi: “Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (pasal 31 ayat 2), dan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” (pasal 31 ayat 4). Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pemerintah merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung-jawab.”

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam konsep-konsep abstrak tinggi harus dijabarkan ke dalam konsep yang lebih bumi sehingga dapat dirumuskan cara pencapaiannya secara terukur. Cara-cara mencapai tujuan pendidikan itu juga harus dirumuskan dan dijabarkan secara rinci ke dalam kurikulum beserta metodologi yang digunakan sehingga keterkaitan antara tujuan dan cara pencapaiannya tergambar jelas.

⁷ Produksi produksi minyak Indonesia yang menjadi andalan pun kini hanya mencapai 1126 ribu barrel/hari (2004). Angka ini sudah berada di bawah konsumsi BBM Indonesia yang jumlahnya sebesar 1150 ribu barrel/hari. Sementara itu, hutan kita yang pada 1985 diperkirakan mencapai luas 120 juta hektar, pada 2001 diperkirakan tinggal 96 juta hektar saja, dan inipun luasnya diperkirakan terus mengalami penciutan hingga 1,7 juta hektar per hari (Lihat Bank Dunia, 2001). Kekayaan alam yang harusnya menjadi modal awal untuk membiayai pengembangan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), ternyata banyak yang tersia-siakan. Anugerah kekayaan alam ternyata tidak berdampak besar pada peningkatan mutu manusia Indonesia sebagai terlihat pada *the Indonesian Human Development Index* tahun 2009 yang masih terus menempatkan kualitas manusia Indonesia pada urutan rendah yakni urutan nomor 111, lebih rendah dari Palestina (urutan ke 110), sebuah negeri yang masih harus berjuang karena pendudukan Israel, dan juga jauh ketinggalan dari negara tetangga, seperti Malaysia (urutan ke-66) dan Thailand (urutan ke-87).

Untuk mendukung proses pencapaian tujuan agar dapat berjalan efektif, berbagai perangkat pendukung diperlukan, baik berupa infrastruktur fisik (seperti gedung perkuliahan, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain), juga infrastruktur sosial (seperti organisasi pelajar/mahasiswa, organisasi seni-budaya, kelompok studi, olah-raga dan lain-lain). Keseluruhan komponen yang terkait dalam proses pendidikan ini harus terintegrasi dalam satu kesatuan sistem manajemen pendidikan holistik yang status legalitasnya jelas, tertuang dalam perundangan-undangan maupun regulasi teknis untuk pelaksanaannya. Pembagian kewenangan antarkomponen dalam sistem tergambar secara jelas.

Analisa sistemik tentang proses pendidikan ini sangat diperlukan untuk memudahkan dari mana dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan. Bila saat ini masih dirasakan adanya kesenjangan tajam antara tujuan ideal pendidikan yang dicita-citakan dengan hasil yang dicapai, maka diperlukan panduan evaluasi tentang bagaimana proses pendidikan yang selama ini berlangsung, dan sekaligus menentukan bagaimana perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk merespons tantangan di masa mendatang.

Uraian berikut akan paparan secara garis besar dari beberapa komponen inti dalam sistem pendidikan yang perlu mendapat perhatian.

a. Pendidikan dalam Mengembangkan Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan

Untuk tercapainya efektifitas dalam menjalankan fungsi penyalur dan pengembang ilmu pengetahuan, peran guru/dosen memiliki fungsi yang sangat sentral. Guru/dosen tidak hanya berfungsi sebagai sumber ilmu yang setiap saat menjadi acuan murid, tetapi ia juga harus berperan sebagai perangsang dalam pengembangan minat peserta didik dalam mencari ilmu pengetahuan secara mandiri. Ilmu pengetahuan didapat selain hasil interaksi dengan guru/dosen, juga dari hasil penjelajahan peserta didik sendiri (*personal discovery*) dengan membaca buku, melakukan penelitian, mengikuti diskusi keilmuan, atau pun perenungan/refleksi. Kepiawaian guru/dosen dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk menggali ilmu secara mandiri ini sangat penting dibanding transfer ilmu yang diperoleh murid dari guru/dosen secara langsung. Karena itu, bentuk-bentuk pendidikan partisipatif dengan menerapkan metode belajar aktif (*active learning*) dan belajar bersama (*cooperative learning*) sangat diperlukan.

Agar proses ini berjalan efektif, tentu kelengkapan infrastruktur harus disediakan, baik berupa fasilitas fisik yang memadai seperti gedung sekolah/kampus, perpustakaan, laboratorium, alat-alat peraga dan lain-lain, atau pun kelengkapan organisasi lembaga pendidikan, harus diadakan.

b. Pendidikan sebagai Penyalur dan Pengembang Karakter Luhur

Pendidikan bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat penyalur ilmu pengetahuan, namun juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-nilai luhur yang menjadi dasar berkembangnya watak yang baik. Watak yang baik itu antara lain berupa sikap jujur, adil, demokratis, disiplin, dan toleran. Watak adalah keunggulan moral yang berperan sebagai penggerak utama seseorang di saat ia akan melakukan tindakan. Watak merupakan kekuatan moral yang dapat berfungsi sebagai daya yang menentukan pilihan bentuk-bentuk tindakan. Bertindak dengan watak berarti melangkah atas dasar nilai-nilai yang baik, luhur, patut, dan berdaya-guna. Watak bukanlah sesuatu yang begitu saja ada

dan tumbuh dalam diri seseorang, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dibangun seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam konteks inilah, guru/dosen memiliki peran sentral dalam keikut-sertaannya membentuk watak peserta didik. Karena itu, guru/dosen dituntut tidak saja mumpuni dalam pengetahuan dan pandai dalam menjalankan tugas menyalurkan ilmu, tetapi juga menjadi acuan dan teladan bagi anak didik. Integritas guru/dosen jelas memiliki kedudukan penting karena pesan moral yang baik hanya akan memiliki kredibilitas tinggi manakala dibawakan oleh penyalur yang baik pula. Namun, pengembangan watak luhur dalam perilaku sehari-hari hanya bisa dilaksanakan bila dalam lingkungan tempat anak dibesarkan terbangun norma-norma pengendali perilaku (baik tertulis ataupun tidak tertulis) yang difahami secara baik dan ditegakkan secara konsisten. Karena pembangunan watak memiliki posisi sangat penting dalam pembangunan bangsa, perlu adanya fokus perhatian terhadap jenis-jenis watak tertentu untuk dikembangkan sehingga menjadi bagian perilaku masyarakat. Di banyak negara lain, telah lama dikembangkan beberapa pilihan watak luhur yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsanya.

Bagaimana dengan Indonesia? Betapa pun para pendiri negeri ini sejak awal telah menyadari betapa pentingnya pembangunan watak, namun hingga hari ini belum ada konsensus kuat tentang jenis-jenis watak luhur mana yang harus diajarkan dan diterapkan secara sistematis. Budi pekerti atau akhlaq mulia memang telah diajarkan pada lembaga pendidikan, namun sifatnya masih sporadis dan kurang intensif (belum terfokus dan ketat) sehingga hasilnya dirasakan belum maksimal.

Bila kita sepakat, fokus perhatian pengembangan watak bangsa Indonesia terletak pada enam watak itu, yakni tiga berdimensi personal (jujur, akal sehat, dan pemberani), dan tiga lainnya berdimensi sosial (adil, tanggung-jawab, dan toleran).⁸ Bila pengembangan keenam watak ini benar-benar dikembangkan secara nasional, tak mustahil peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam kurun waktu satu generasi saja akan terjadi

Penekanan jenis-jenis watak yang ingin dikembangkan di suatu lingkungan tertentu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Di lingkungan perguruan tinggi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk dikembangkan watak “kejujuran akademis” (*academic honesty*). Watak ini penting dikembangkan agar mahasiswa dan dosen memiliki kesadaran tinggi dan memiliki komitmen kuat untuk menjunjung tinggi kejujuran akademis sehingga tak mudah terjerumus pada praktek-praktek ketidak-jujuran, seperti plagiatisme (*plagiarism*) dalam berkarya. Ini penting karena dengan

⁸ Tentu saja, selain sikap-sikap yang disebutkan ini sebagai watak luhur yang perlu dikembangkan, masih banyak lagi sikap luhur yang dapat digali sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa Indonesia. Sebagai contoh, sikap ramah pada orang lain dan kesediaan bergotong-royong adalah sikap yang sering disebut sebagai watak bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Lebih jauh, Ratna Megawangi (2004), yang belakangan ini giat menyelenggarakan pendidikan karakter di berbagai wilayah di Indonesia melalui *Indonesia Heritage Foundation* menyebut sembilan sikap luhur yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak Indonesia. Sikap itu adalah: 1) cinta Tuhan dan kebenaran, 2) tanggung-jawab, kedisiplinan dan kemandirian, 3) amanah, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, 6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan, 8) baik dan rendah hati, dan 9) toleransi dan cinta damai.

berkembangnya teknologi digital dan semakin terbukanya akses informasi, berbagai kemudahan untuk mengunduh (*download*) data, mengirim file, dan melakukan duplikasi text dengan cara “*copy/cut and paste*” di setiap komputer, plagiarisme semakin mudah dapat dilakukan.

Kemudian, watak lain yang juga perlu dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi adalah watak untuk ‘produktif’ dan “kreatif/inovatif” dalam berfikir dan berkarya. Bila watak ini secara khusus didorong untuk dikembangkan, niscaya perguruan tinggi akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran produktif, kreatif/inovatif, dengan didasarkan pada sifat kejujuran yang kuat. Agar watak semacam ini dapat kuat terbangun, pihak kampus harus merancang infrastruktur yang memadai, baik berupa kurikulum pengajaran yang secara tegas mendukung tujuan ini, merumuskan aturan-aturan tegas bagi pelanggaran kejujuran, membangun pakta-integritas untuk menjaganya, merancang data-base untuk pemantauan (*monitoring*), hingga menumbuhkan suasana interaksi akademis yang sehat dan berintegritas.

Apapun pilihan yang ditentukan, yang paling penting dilakukan adalah mencanangkan pelaksanaan strategi pendidikan yang tepat agar watak luhur itu dapat berkembang dan terinternalisasi efektif dalam diri setiap peserta didik. Selain sekolah/kampus, lingkungan keluarga menjadi tempat penting bagi pembangunan watak luhur ini. Peran orang-tua di rumah tetap memiliki posisi paling sentral. Tak dapat dipungkiri, lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan terpenting di banding lainnya. Karena itu, pembangunan watak secara nasional mustahil dapat dilakukan tanpa upaya serius mendorong keluarga untuk ikut menjalankan misi *character building* ini.

Namun, kehidupan modern tak jarang semakin dilihat menggeser peran keluarga. Jam belajar dan interaksi sosial anak di lingkungan sekolah/kampus sering lebih panjang dibanding interaksi dalam keluarga. Karena itu, peran sekolah/kampus dalam ikut membangun watak peserta didik pada tempat dan waktu tertentu bisa lebih penting. Karena itu, sebagaimana dikatakan Thomas Lickona (1993): "*School must help children understand core values, adopt or commit to them, and then act upon them in their own lives*". Artinya, dalam pendidikan karakter, sekolah/kampus harus mendorong peserta didik untuk mampu memahami nilai-nilai moral yang baik (*moral knowing*), mampu merasakan nilai-nilai luhur itu hingga ke lubuk hati yang paling dalam (*moral feeling*), dan akhirnya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan apa yang diketahui dan dirasakannya itu ke dalam tindakan nyata (*moral action*) (Ratna Megawangi, 2004: 111).

Apa yang harus diperhatikan agar hal ini dapat terimplementasi? Shea (2003) menyebut empat aspek yang harus dilakukan dalam pembentukan watak, yakni:

1. Perhatian pada sisi emosi peserta didik seperti menghargai diri sendiri (*self-respect*), kemampuan ber-*empathy*, dapat menahan diri (*self-control*), rendah hati dan lain-lain.
2. Meningkatkan *life-skills* seperti kemampuan mendengarkan orang lain dan kemampuan berkomunikasi.
3. Menumbuhkan kemauan (*will*), seperti menguatkan niat dan menghimpun tenaga untuk melaksanakan prinsip-prinsip luhur dalam kehidupan nyata.
4. Pembiasaan (*habit*), yakni pengembangan sikap untuk merespon berbagai situasi dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Superka, Ahrens dan Hedstrom (1976) menyarankan strategi yang sedikit berbeda:

Beragam cara kreatif dapat dicoba dilakukan dalam pendidikan karakter. Namun yang perlu diingat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pengembangan karakter luhur hanya akan tumbuh sehat, bila ada dukungan kuat dari komunitas tempat seseorang hidup sehari-hari. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang di dalamnya terjadi interaksi yang sejajar, yakni masing-masing anggota memiliki kesamaan derajat, ada kesamaan tingkat keterlibatan, dan ada sikap keterbukaan. Langkah membangun interaksi sehat ini memerlukan pemahaman dan latihan terus-menerus. Manakala komunitas semacam ini terbangun, maka setiap anggota di dalamnya memiliki jalinan hubungan erat yang diikat oleh nilai-nilai moral yang disepakati bersama. Sikap luhur seperti kejujuran, keadilan, tanggung-jawab, rasional, berani dan toleran sebagaimana disebutkan, bila telah menjadi bagian dari norma komunitas, akan berkembang kuat. Setiap anggota dalam komunitas itu secara demokratis akan menjaganya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Pola-pola interaksi sehat merupakan embrio tumbuhnya sebuah komunitas responsif. Amitai Etzioni (1996) menggunakan terminologi “komunitas responsif” untuk menandai sebuah komunitas yang bersifat non-represif, yaitu sebuah komunitas yang di dalamnya, di satu sisi, tidak ada upaya-upaya pemaksaan penerapan nilai karena tidak ada lagi kekuatan sentripetal komunitas (*centripetal forces of community*) yang memberangus hak-hak individu, namun di sisi lain, tiap-tiap individu tidak juga menganut kebebasan yang mengabaikan tanggung jawab kolektif (sebagaimana terjadi dalam iklim komunitas *libertarian free-for-all*). Nilai-nilai moral bersama tumbuh atas kesadaran, bukan paksaan. Etzioni (1996, hal. 92) menulis, “*the term ‘responsive’ implies that the society is not merely setting and fostering norms for its members, but is also responding to the expressions of their values, viewpoints and communications in refashioning its culture and structure.*”

c. Pendidikan sebagai Pembangun Tumbuhnya Rasa Kebangsaan

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa, tak dapat disangkal bahwa akhir-akhir ini rasa kebangsaan (ke-Indonesia-an) menjadi salah satu perhatian utama. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketimpangan pembangunan antardaerah yang terus melebar, konflik antar kelompok yang merebak di hampir seluruh gugusan kepulauan Indonesia dan lain-lain, sedikit banyak telah menurunkan rasa percaya diri sebagian rakyat tentang kemampuan bangsa ini untuk melanjutkan cita-cita proklamasi. Pada saat pesimisme semacam ini tumbuh, di tingkat global juga terjadi perubahan konstelasi kekuatan politik-ideologi yang berdampak pada penataan ulang komposisi kehidupan bangsa-bangsa yang tak jarang berlanjut pada gugatan eksistensi suatu bangsa. Krisis global ini memiliki dampak psikologis terhadap Indonesia.

Saat kita menyaksikan, kekuatan blok Soviet memudar dan segera diikuti runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989, segera muncul *euphoria* kemenangan ideologi demokrasi liberal atas dua saingan utamanya, yaitu komunisme dan nasionalisme fasis. Maka demokrasi pun menjelma seperti virus, yang menurut Snyder (2000: 16), telah menyebar dan menyapu bekas negeri-negeri otoritarian di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur, dan bahkan kini menuju Asia Timur. Inilah era kemenangan liberalisme di mana tiap negara di dunia terintegrasi dalam ekonomi pasar, dan satu sama lain semakin dalam mengalami ketergantungan ekonomi. Fukuyama (1989) pun tanpa

ragu menegaskan, era ini sebagai “*the end of history.*” Pergulatan ideologis yang selama ini berjalan intens, dianggap telah tamat.

Namun, di tengah *euphoria* kemenangan demokrasi liberal, segera saja kekhawatiran muncul. Proses demokratisasi yang diyakini akan membawa harapan baru terhadap tatanan kehidupan politik dunia yang lebih damai, atau menawarkan iklim perdagangan bebas yang akan meningkatkan kemakmuran, atau era yang mendorong lebih dihormatinya hak-hak asasi manusia di tiap negeri, ternyata di tahun 1990-an diwarnai pula oleh berbagai bentuk kekerasan komunal yang penuh dengan tindak kekejaman di luar batas. Korban-korban kemanusiaan pun telah berjatuh di banyak negara seperti di Rwanda, Burundi, Somalia, Bosnia, Caucasus, Tajikistan, Chechnya, Kosovo dan juga Indonesia. Proses demokratisasi yang secara dramatis membawa perubahan, ternyata menciptakan *socio-political shock*, sehingga semakin cepat tingkat perubahan sosial terjadi, semakin memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan *intra-societal*.

Kini, suara bernada pesimistis pun muncul. Di tengah antusiasme demokratisasi, Kaplan (1994) telah mengkhawatirkan munculnya “*the coming anarchy.*” Francois Mitterand, saat menjabat Presiden Perancis, telah lebih dulu menyebut adanya bahaya “neotribalisme” yang bahkan dapat hadir di tengah demokrasi Eropa yang sudah dewasa. Juga, Presiden Bill Clinton, dalam pidato pelantikan 1993, di samping ia menyambut era baru ini sebagai era yang menjanjikan kebebasan, ia juga menandai adanya ancaman “*ancient hatreds*” (kebencian-kebencian kuno) yang dapat tumbuh subur, mengancam peradaban manusia.

Ini semua menjelaskan, bahwa kita bangsa Indonesia yang kini pun tak lepas dari situasi transisi demokrasi yang seringkali menghadapkan kita dalam situasi kritis, karena kita pada saat ini tepat berada pada persimpangan jalan—jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Bila proses transisi ini tak dapat kita lalui dengan baik, ancaman yang kita hadapi tidak saja proses disintegrasi bangsa (lepasnya wilayah tertentu dari negara), tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses disintegrasi sosial, atau hancurnya *social bond* (kerekatan sosial) dalam masyarakat. Bila *social bond* hancur, akan tumbuh *social distrust* (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok satu dengan yang lain dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan saling berupaya meniadakan. Dalam situasi ini, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, *war of all against all*, bukan lagi menjadi khayalan. Dan kini, pertanyaan pun muncul, akankah kita sebagai bangsa dapat selamat melampaui masa-masa kritis ini? Kondisi apakah yang harus kita cermati bersama untuk mencegah ancaman ini? Langkah-langkah apakah yang harus segera kita lakukan untuk penyelamatan?

Sejak awal berdirinya republik ini, para pendiri negeri (*the founding fathers*) agaknya menyadari sepenuhnya bahwa proses *nation building* merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Bung Karno, misalnya (lihat Sukarno, 1963: 3-6 dan 509), sejak awal berupaya membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan “suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu *bangsa.*” Dengan mengacu pada pendapat Ernest Renan, Bung Karno mengatakan bahwa keberadaan suatu bangsa hanya mungkin terjadi bila ia memiliki suatu nyawa, suatu asas-akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, dan sekarang memiliki kemauan,

keinginan hidup menjadi satu. Bagi Bung Karno, keinginan hidup menjadi satu bangsa itu dasarnya bukan nasionalisme sempit atas kesatuan ras, bahasa, agama, persamaan tubuh, ataupun sekedar batas-batas negeri, namun lebih didasarkan pada nasionalisme yang longgar, nasionalisme yang luhur, nasionalisme yang mementingkan kesejahteraan manusia Indonesia, dan yang mengutamakan persahabatan dengan semua kelompok (inklusif). Bung Karno pun mengutip ucapan Karamchand Gandhi: “Buat saya, maka cinta saya pada tanah-air itu, masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot, oleh karena saya manusia dan berbicara manusia. Saya tidak mengecualikan siapa juga”. Dengan demikian, Bung Karno secara tegas menolak nasionalisme yang ia sebut bersifat “chauvinis” dan “provinsialistis” yang memecah belah. Nasionalisme semacam ini, ia anggap sebagai bentuk “assyabiyah yang dikutuk Allah.”

Untuk membangun rasa kebangsaan ini tentu tak cukup hanya dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang dikobarkan melalui pidato-pidato yang menggelora. Oleh karena itu, begitu kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan, dirumuskanlah sebuah konstitusi (UUD 1945) yang dalam pembukaannya secara tegas menuangkan cita-cita Indonesia, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Cita-cita inilah yang menjadi modal awal merekatnya rasa kebangsaan.

Namun, kini apa yang telah terjadi setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan hingga saat ini? Nampaknya, dalam perjalanan bangsa selama ini, terlalu banyak elemen bangsa, terutama para elit politik, sadar atau tidak, telah banyak yang mengkhianati cita-cita luhur dan menyalahgunakan modal sosial yang telah dicoba dibangun sejak masa-masa awal kemerdekaan dengan susah payah.

Ketimpangan ekonomi jelas berpotensi memperkuat terjadinya ketegangan antarkelompok. Keadaan menjadi semakin rentan manakala garis batas antarkelompok sosial ini menjadi menebal akibat sekat-sekat sosial seperti etnis, ras, agama, atau pun asal daerah terintegrasi menjadi satu. Berbagai kelompok berbeda satu sama lain, tidak saja karena perbedaan ekonominya, namun juga etnis, ras, agama dan asal daerahnya. Kemudian, dengan derasnya arus globalisasi yang ternyata sering bersifat paradoksikal, yakni di satu sisi membawa efek penyeragaman, tapi di sisi lain menumbuhkan kuatnya kesadaran identitas kelompok, ternyata juga menambah tajam fragmentasi sosial.

Akibat keadaan inilah, kini Indonesia terus diwarnai oleh konflik-konflik antara kelompok-kelompok yang bersifat emosional dan brutal. Konflik-konflik sosial politik yang telah memakan begitu banyak korban telah terjadi di banyak tempat lain di Indonesia.

Dengan demikian, semangat persatuan, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme luhur atau tumbuhnya *civic nationalism*, yakni “loyalitas terhadap seperangkat cita-cita politik dan kelembagaan yang dianggap adil dan efektif” dalam bingkai suatu negara (Snyder, 2000: 24) jelas bukanlah suatu yang secara *taken for granted* ada dan terbangun. Rasa kebangsaan dapat menguat dan melemah atau bahkan dapat hilang sama-sekali tergantung bagaimana bangsa itu mengelolanya. Karena itu, proses *nation building* tidak boleh terhenti.

Dalam konteks inilah, kebijakan di bidang pendidikan harus terkait dengan tujuan menumbuhkan rasa persatuan dan rasa kebangsaan. Rumusan kurikulum pengajaran maupun arah penelitian dan kegiatan sosial (pengabdian masyarakat) yang dicanangkan di sekolah maupun kampus, harus terkait langsung dengan upaya *nation building* secara terus-menerus, yakni mendorong tumbuhnya integrasi nasional dan integrasi sosial yang kuat. Rancangan kegiatan pendidikan dapat difokuskan pada tema-tema berikut:

1. Membangun pemahaman/kesadaran tentang cita-cita pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang didasarkan pada nasionalisme kewargaan (*civic nationalism*) yang bertumpu pada rasa kemanusiaan.
2. Membangun pemahaman/kesadaran pentingnya toleransi dalam menjalankan kehidupan bersama dalam rangka membentuk “kewargaan multikultural” (*multicultural citizenship*) menuju masyarakat kreatif dan responsif.
3. Merancang perangkat ajar dan tema-tema penelitian dan kegiatan sosial yang mendorong tumbuhnya pemahaman dan sikap saling menghormati pada kelompok adat, etnis, agama, ras, perbedaan gender, asal-usul, dan identitas lainnya.
4. Melatih ketrampilan mediasi dan negosiasi dalam rangka membangun perdamaian melalui upaya-upaya resolusi konflik dan transformasi konflik.

Sebagaimana pembangunan watak (*character building*), proses pembangunan rasa kebangsaan juga tak mungkin hanya diemban oleh lembaga pendidikan formal (sekolah maupun perguruan tinggi) semata. Keterlibatan keluarga dan komunitas yang bersifat responsif juga sangat menentukan. Karena itu, adalah tugas pemerintah untuk menciptakan komunitas-komunitas responsif ini yang di dalamnya mengemban misi kebangsaan.

Keseluruhan proses pendidikan ini harus selaras dengan strategi nasional dalam menjalankan *nation building* tersebut. Prinsip-prinsip dasar strategi nasional untuk tujuan ini dapat dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, *nation building* hanya dapat terlaksana manakala dicanangkan strategi nasional yang dilakukan secara kreatif untuk menumbuhkan “solidaritas emosional” dalam bingkai kebangsaan. Dengan kata lain, pemerintah dan tiap komponen bangsa harus didorong untuk menerapkan “seni mencinta” (*the art of loving*) yang baik dalam berhubungan dengan sesama anak bangsa, khususnya yang memiliki perbedaan latar-belakang, sehingga interaksi antar kelompok dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam satu kebangsaan. Untuk inilah kita memerlukan pemahaman budaya tiap-tiap kelompok sehingga masing-masing kelompok memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Lebih jauh, pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak menciptakan rasa terpinggirkan. Pengelolaan harus mampu menciptakan *the Indonesian Dream* yang dinamis bagi tiap-tiap warga-negara.

Kedua, *nation building* harus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan “solidaritas fungsional,” yakni solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang relatif seimbang.

Upaya pengembangan sistem pendidikan memerlukan peta jalan yang jelas. Perlu kejelasan tujuan yang ditindak-lanjuti dengan metodologi cara pencapaiannya (proses) dan struktur pendukung yang harus diadakan. Keseluruhan mekanisme kerja ini memerlukan manajemen yang kreatif yang tidak hanya terpaku pada panduan-panduan baku, tetapi membuka kemungkinan dikembangkannya perubahan-perubahan yang

bersifat produktif. Dalam menyusun kebijakan, kita memerlukan kejelasan ke mana perkembangan ilmu pengetahuan akan diarahkan. Bagaimana merumuskan arah pendidikan sehingga secara realistis dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah konkret sehingga hasilnya dapat terukur. Akhirnya, dari keseluruhan proses ini, perlu kejelasan bentuk masyarakat seperti apakah yang ingin kita tuju sehingga pada saat kita merumuskan visi, misi, dan strategi pembangunan masyarakat tidak kehilangan arah.

Untuk terlaksananya program-program ini, diperlukan pemimpin-pemimpin visioner, yang mampu memberikan semangat, memperjelas arah perjalanan bangsa secara nyata, mengambil keputusan secara tegas dan konsisten, menggalang kembali kecintaan akan kebersamaan di hadapan semua orang, terutama sekali di hadapan kaum muda terpelajar dari semua golongan, sehingga mereka bersama-sama bersedia untuk bekerja dengan semangat tinggi untuk cita-cita yang satu. Kita butuh pemimpin yang mampu membangkitkan ruh hidup bersama, yaitu ruh semangat kebangsaan dalam konteks baru, dalam konteks tatanan masyarakat yang kini tumbuh secara dinamis. Para pemimpin itu adalah pemimpin yang dapat menemukan “*software* sosial baru” yang kuat menopang dinamika perubahan sosial yang kini tengah berlangsung.

Namun, bila kita menyadari bahwa kini kita juga sedang mengalami krisis kepemimpinan, maka tak ada pilihan lain, bila bangsa ini masih ingin bertahan hidup menghadapi tantangan zaman yang semakin keras, kita harus melakukan upaya kolektif untuk melakukan penanggulangan masalah secara bersama-sama. Di tiap-tiap komunitas, perlu digalang pembentukan “unit-unit reaksi cepat” untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Berbagai kelompok mediasi harus ditumbuhkan untuk mengatasi konflik yang muncul. Asosiasi orang-tua murid, pemuda, seniman, wartawan dan lain-lain perlu segera diaktifkan untuk mempercepat terciptanya komunitas responsif di lingkungannya masing-masing. Pada saat yang sama, kalangan pendidik yang mengabdikan diri di berbagai lembaga pendidikan harus bangkit untuk mengambil peranannya untuk melakukan penyelamatan bangsa.

BAB IV: PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI

4.1. Konteks Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional

Pengembangan paradigma pendidikan nasional mesti dikaitkan dengan falsafah pendidikan progresif yang ditekankan pada pentingnya peran serta aktif para pembelajar (*the learners*) dalam penetapan tujuan yang mengarahkan segenap aktivitas mereka masing-masing dalam keseluruhan proses pembelajaran, menuju tercapainya kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan (John Dewey, dikutip oleh Ackoff & Greenberg, 2008). Pendidikan pada hakekatnya adalah proses penemuan diri yang berlangsung sepanjang hayat untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki seseorang secara penuh, yang memberikan kepuasan dan makna pada kehidupannya.

Semenjak dua abad yang pertama dari Revolusi Industri, pendidikan cenderung diarahkan pada peningkatan kemampuan baca-tulis-berhitung (*reading, writing, arithmetic*) guna menghasilkan tenaga kerja terampil untuk menjalankan roda industri. Makna hakiki pendidikan sebagai '*a lifelong process of self-discovery*' nyaris terlupakan. Pendidikan secara massal pun berkembang tanpa kendali, memperlakukan murid sebagai bahan mentah yang diproses secara 'mekanistik' untuk menghasilkan produk akhir yang 'bisa dijual'.

Dari lima muara pengembangan pendidikan: sains, teknologi, ekonomi, etika dan estetika, tiga muara yang disebut terdahulu yang diutamakan. Padahal muara etika yang menyangkut perilaku, kesantunan, keadaban sangat penting bila mengingat kembali bahwa pendidikan adalah pengawal peradaban (*the guardian of civilization*).

Demikian juga aspek estetika, yang bertautan dengan keindahan sebagai produk dari aktivitas kreatif dan rekreatif; selama ini kurang memperoleh perhatian. Akibatnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan yang semula asri, selaras, serasi, seimbang, penuh harmoni, sekarang menjadi kian bertambah rusak, jelek dan membahayakan kehidupan manusia, terutama generasi mendatang.

Paradigma pendidikan yang terlalu terfokus pada kepentingan pragmatis, *teaching mind* melalui *drill & skill*, kiranya perlu diseimbangkan dengan tujuan ideal *touching heart* melalui *ethics & esthetics*. Mesti disegarkan kembali bahwa pendidikan merupakan kekuatan moral dan intelektual yang berjalan seimbang, tidak boleh timpang.

Selama ini nampak bahwa pendidikan di Indonesia terlalu menekankan aspek intelektualitas, kurang memperhatikan aspek moralitas. Lebih banyak berkutat tentang pemenuhan kepentingan pasar dan industri, ketimbang pengembangan karakter dan kearifan. Lebih disibukkan dengan urusan pencarian dana daripada mengembangkan ilmu yang autentik. Padahal Washburn (2005) sudah mengingatkan bahwa "*The greatest threat to the future of higher education is the intrusion of a market ideology into the heart of academic life.*" Dalam konteks pedagogik, tak kalah penting untuk diungkapkan tentang suasana demokratis yang harus diciptakan agar setiap pembelajar berani menyampaikan gagasan, bila perlu berdebat, kendati dengan cara yang santun.

Dialog antara guru dengan murid yang mengalir lancar dan tema yang luas akan sangat menyenangkan, menumbuhkan rasa percaya diri, tidak takut berbuat salah, berani mengambil resiko, dan tertantang mencoba hal-hal baru. Sekolah dan kampus menjadi tempat yang selalu menarik, belajar sambil bermain, dan sarat dengan tantangan. Mereka juga akan belajar saling menghargai dan saling menghormati, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata di luar sekolah.

Paradigma pendidikan yang demokratis, bernuansa permainan, penuh keterbukaan, menantang, melatih rasa tanggung jawab, akan merangsang anak didik untuk datang ke sekolah atau ke kampus karena senang, bukan karena terpaksa. Meminjam kata-kata Ackoff & Greenberg (2008) : *“Education does not depend on teaching, but rather on the self-motivated curiosity and self-initiated actions of the learner.”*

4.2. Transisi ke Abad XXI

Kenyataan memperlihatkan bahwa perubahan tata kehidupan abad XX lebih sering terjadi baik dalam magnitudo maupun keragamannya, dibandingkan dengan perubahan selama 1000 tahun sebelumnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan itu didorong oleh tatanan sosioekonomik abad XIX, yang didesakkan oleh revolusi industri. Pada kesempatan berikutnya revolusi itu memacu dan memicu kebutuhan teknologik, ilmu pengetahuan dan sosial budaya dalam arti memerlukan tenaga trampil, cerdas dan terdidik untuk mengelola perubahan itu. Tidak kalah pentingnya ialah berkembangnya modus ilmu pengetahuan dalam ranah produksi keilmuan. Kita juga mencatat bahwa dalam abad XX itu, gagasan dan manusia tidak hanya merambah ke jagad renik dan menemukan material baru sebagai soko guru ilmu pengetahuan, tetapi juga melahirkan konsep, gagasan dan aksi menjelajah alam dalam 3-dimensi, sebagai perluasan usaha sebelumnya untuk menguasai bumi melalui usaha-dua dimensional. Bersamaan dengan itu tumbuh tantangan dan perkembangan etos serta gairah penelitian alam dan hakikatnya.

Sementara itu kita juga mencatat bahwa pada abad XX merebak Perang Dunia yang meminta korban 43 juta manusia, tetapi juga mendudukan berbagai kelompok bangsa dalam pinggir perang dingin yang sangat menghantui kemanusiaan. Kesalahan dan teror dalam mengelola kemampuan perlombaan persenjataan nuklir mengancam perjalanan bangsa dalam setiap kelok peradaban. Kini pada abad XXI, walaupun harus diakui masih adanya ancaman ledakan nuklir, penghasil energi pemusnah yang belum terkalahkan, kemanusiaan masih harus mewaspadaai adanya ancaman lain yang berkembang dari dalam laboratorium ilmu pengetahuan mulai dari pemanfaatan bioteknologi sampai kepada kecanggihan perlombaan persenjataan dan perusakan lingkungan karena tidak terkontrolnya virus buatan. Manusia juga disadarkan bahwa penyakit jenis baru tidak dapat diabaikan begitu saja. Ancaman alami yang datang dari gesekan lempeng benua, maupun dari simpanan magma yang terkungkung, daya sembur dan ledak gunung api. Ulah manusia sendiri ikut memberi aksen pemanasan angkasa bumi yang dapat berlanjut pada perusakan lingkungan. Kemajuan ilmu pengetahuan juga memperlihatkan bahwa bumi kita bukan wahana antariksa aman bagi kemanusiaan.

Hikmah dari semua ini yang dapat kita tarik adalah terlihatnya ubahan peta dunia yang

tampak tidak lagi hanya pembagian menurut sekat ideologi atau geografis, yang makin lama makin pudar. Namun, secara virtual terdapat sekat teknologik dan saintifik. Hampir semua bangsa mendekatkan diri dengan penguasa pasar global, yang ditandai dengan atribut penguasaan teknologi dan inovasinya. Mereka yang tidak dapat meraihnya harus rela tergeser kepinggiran dan tertinggal dibelakang, dalam percaturan bangsa di dunia model baru itu.

4.3. Tujuan Pendidikan Nasional Abad XXI

Adalah cita-cita setiap bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, dan hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain. Demikian pula bangsa Indonesia bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi serta terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia global dalam abad XXI ini. Semua ini dapat dan harus dicapai dengan kemauan dan kemampuan sendiri, yang hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh anak bangsa. Kata kunci dalam pendidikan ini adalah *kemandirian*.

Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

Pendidikan Nasional abad XXI bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Dengan kata kesejahteraan tercakup *kesejahteraan spiritual* yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai *kebahagiaaan dalam kehidupan*, dan *kesejahteraan fisik* yang dapat pula dikatakan sebagai *hidup yang berkecukupan*.

Terwujudnya kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan dalam kehidupan suatu masyarakat tercermin dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang nyaman, mulai dari lingkungan rumah tangga sampai ke lingkungan antara bangsa dengan saling dihormati dan menghormati. Ini semua hanya akan tercapai, bila masing-masing anggota masyarakat berpegang pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatan, yang antara lain saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa kebersamaan, empati, dan sebagainya. Di samping itu masing-masing anggota masyarakat itu memiliki pula sikap-sikap yang terpuji, yaitu kesediaan dan kemauan untuk saling membantu dan berbuat untuk kemanfaatan bersama, termasuk dalam ini menaati kesepakatan bersama yang dapat terungkap mulai dari berbagai aturan dalam keluarga, sampai dengan peraturan dan perundangan lokal dan nasional, serta antara bangsa.

Kesejahteraan material atau hidup berkecukupan adalah kehidupan yang terbebas dari kemiskinan, walaupun tidak harus berupa kemewahan. Ini akan dapat terwujud bila masing-masing warga negara memiliki dan menguasai kecakapan dan keilmuan, yang disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan

bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu.

Uraian di atas dapat dipandang sebagai kunci untuk mengelaborasi dan menjabarkan lebih lanjut pengertian sumber daya manusia yang berkualitas yang diungkapkan dalam tujuan pendidikan yang dikemukakan di atas. Dari sini pulalah dapat dirumuskan paradigma pendidikan nasional kita, yang kalau diringkaskan adalah menanamkan nilai-nilai luhur serta menumbuh-kembangkan sikap hidup yang terpuji, di samping memberikan pengetahuan dan kecakapan yang mengikuti perkembangan zaman.

Dalam abad XXI terdapat berbagai kekhususan yang utama. Yang pertama adalah terwujudnya masyarakat global yang menjadi kesepakatan antara bangsa, yaitu terbukanya mobilitas yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain dalam berbagai hal. Yang kedua adalah abad ini akan lebih dikuasai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang makin canggih dan berpadu pula dengan ilmu sosial dan humaniora, sebagaimana diuraikan dalam bab III. Agar mampu berkompetisi dalam masyarakat global tersebut, setiap bangsa bukan hanya harus menguasai perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga mempunyai penguasaan yang cukup pula atas sains sosial dan humaniora serta perkembangannya.

Dalam abad ini masing-masing ilmu tidak lagi harus bekerja sendiri, melainkan berbagai cabang ilmu dapat bekerja sama, bukan hanya dalam sesama kelompok sains, teknologi, atau sains sosial dan humaniora saja, melainkan dalam banyak hal antara beberapa kelompok.

Walaupun perkembangan sains dan teknologi canggih adalah konsumsi perguruan tinggi, namun kesiapan mahasiswa menyerapnya sangat ditentukan oleh hasil pendidikan pra universitas, mulai jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan menengah, bahkan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Dengan demikian rangkaian setiap jenjang pendidikan, sekurang-kurangnya mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, dan sedapat-dapatnya mulai dari PAUD haruslah merupakan rantai-rantai yang masing-masing terdiri dari mata rantai dengan ciri khasnya dan semuanya tersambung secara utuh. Walaupun demikian, pada rangkaian rantai suatu jenjang ke rantai jenjang berikutnya perlu diberi cabang, yaitu rantai yang mengarah ke pendidikan lanjut (pendidikan akademik) dan rantai yang mengarah ke persiapan memasuki masyarakat (pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesi).

Demikian pula, untuk menghadapi dunia global ini usaha meningkatkan mutu pendidikan sampai bertaraf internasional adalah suatu keharusan, namun bukan dengan mempertentangkan atau membedakan yang satu dengan yang lain dengan berbagai sebutan. Sekalipun demikian, menanamkan rasa kebangsaan dan penghayatan dan kemampuan menghargai budaya nasional merupakan butir yang harus selalu dilakukan di setiap jenjang pendidikan.

4.4. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI

Sebagai bangsa yang mempunyai harga diri dan yang telah mengacungkan unggulan berbudaya tidak dapat menutup mata serta telinga, berdiam diri, acuh terhadap daya guna pembaharuan ilmu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk kebaikan umat manusia. Kebangunan dan citra bangsa baru akan terlihat jika kita ikut berlomba dalam peradaban dengan menyumbangkan karya, pikiran dan keagungan pikir dalam tatanan dunia yang baru. Usaha kita itu terutama untuk kepentingan dan keselarasan pembangunan bangsa menghadapi ekonomi dan sosial yang sadar-pengetahuan, dan penciptaan manusia berkapasitas pemecah soal. Kita ikut mengisi khazanah ilmu pengetahuan teoretis maupun terapan sambil memancarkan wawasan dan kemitraan yang murni.

Bersamaan dengan pembaharuan hidup berkebangsaan dengan ekonomi dan sosial sadar-pengetahuan kita membangun manusia **berdaya cipta, mandiri dan kritis** tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk diajak maju menikmati kemampuan yang disediakan abad ini. Berdaya cipta ialah menggenggam pengertian bahwa sosok tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang asli dan khas dan, tentunya, berguna bagi penyelenggaraan hidup terhormat. Seperti kita pahami sosok seperti ini adalah mereka yang tidak hanya dapat membangkitkan satu jawaban mutlak menurut resep. Tetapi mereka adalah sosok yang mampu menghasilkan pemikiran berangkai, yakni menyediakan berbagai gagasan khas namun, pada akhirnya dia harus mampu memilah dan menentukan yang terbaik. Hal ini harus tampak pada modus pendidikan masa kini yang tidak hanya mengagungkan satu alur pemikiran saja.

Dalam hubungan ini kita ditantang untuk mencipta tata-pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu secara mandiri ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan seperti layaknya warga abad XXI. Mereka harus terlatih mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih kekuatan fisik konvensional. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan kenyataan bahwa penguasaan serta akses tekno-sains yang bukan lagi didominasi oleh dunia akademis, mereka harus memiliki kreativitas tinggi yang diperlihatkan dengan kentalnya sifat inovatif dan inventif dalam karya-karya orisinal mereka. Tentu saja dalam memandang ke depan dan merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyataan yang mengikat kita dengan realita kehidupan. Indonesia masih menyimpan banyak kantong-kantong kemiskinan, wilayah kesehatan umum yang tidak memadai dan kesehatan kependudukan yang rendah serta mutu umum pendidikan yang belum dapat dibanggakan. Ini memerlukan perhatian dan upaya yang serius, taat azas dan, tidak kurang pentingnya, dana. Kita juga masih menyandang kewajiban luhur membawa kelompok-kelompok terpicil dan belum terendus pendidikan dalam pengertian berbangsa. Kewajiban kita adalah mengangkat dan mengajak mereka agar dapat bersama-sama merasakan kenyamanan zaman baru, apakah itu manfaat dari energi, komunikasi, layanan kesehatan maupun hak dalam alam demokrasi dan hak di hari tua.

Sederet falsafah dan kebijakan tradisional, yang berkembang dalam kehidupan kita, terangkum sebagai budaya bangsa, telah ikut menerapkan dan merawat lingkungan hidup alami. Namun masuknya budaya asing, yang kurang empati terhadap kehidupan

lingkungan telah dapat mencabut akar kebajikan itu dari lingkungan tanpa daya kita untuk mencegahnya. Nurani dan akal sehat haruslah menjadi ciri dalam pendidikan dalam abad yang tak lagi mengenal batas geografi seperti abad XXI ini.

Memasuki abad XXI, terasa begitu banyak hal yang berubah secara fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Runtuhnya sekat-sekat geografis akibat agenda globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah dunia ini menjadi sebagaimana layaknya sebuah desa raksasa yang antar penghuninya dapat dengan mudah saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi kapan saja serta dari dan di manapun mereka berada. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan dunia membengkak luar biasa, antara lain diperlihatkan melalui sejumlah fenomena seperti:

- a. Mengalirnya beragam sumber daya fisik maupun non-fisik (data, informasi, dan pengetahuan) dari satu tempat ke tempat lainnya secara bebas dan terbuka. Ini telah merubah total lingkup bisnis dan lingkup usaha yang selama ini terlihat mapan;
- b. Meningkatnya kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam proses penciptaan produk dan/atau jasa yang berdaya saing tinggi secara langsung maupun tidak langsung telah menggeser kekuatan ekonomi dunia dari “barat” menuju “timur” dari “utara” ke ‘selatan”;
- c. Mekuatnya tekanan negara-negara maju terhadap negara berkembang untuk secara total segera menerapkan agenda globalisasi yang disepakati bersama memaksa setiap negara untuk menyerahkan nasibnya pada mekanisme ekonomi pasar bebas dan terbuka yang belum tentu mendatangkan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat;
- d. Membanjirnya produk-produk dan jasa-jasa negara luar yang dipasarkan di dalam negeri selain meningkatkan suhu persaingan dunia usaha juga berpengaruh langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari;
- e. Membludaknya tenaga asing dari level buruh hingga eksekutif memasuki bursa tenaga kerja nasional telah menempatkan sumber daya manusia lokal pada posisi yang cukup dilematis di mata industri sebagai pengguna; dan
- f. Meleburnya portofolio kepemilikan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik bersama pengusaha Indonesia dan pihak asing di berbagai industri strategis tanpa disadari menjadi jalan efektif masuknya budaya luar ke tengah-tengah masyarakat tanah air.

Berbagai fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi merambah ke segala hampir di seluruh negara berkembang yang ada— bahkan beberapa negara maju di dunia barat pun merasakan tantangan yang sungguh hebat akibat munculnya kekuatan dari negara di Asia seperti Cina, India, dan Taiwan.

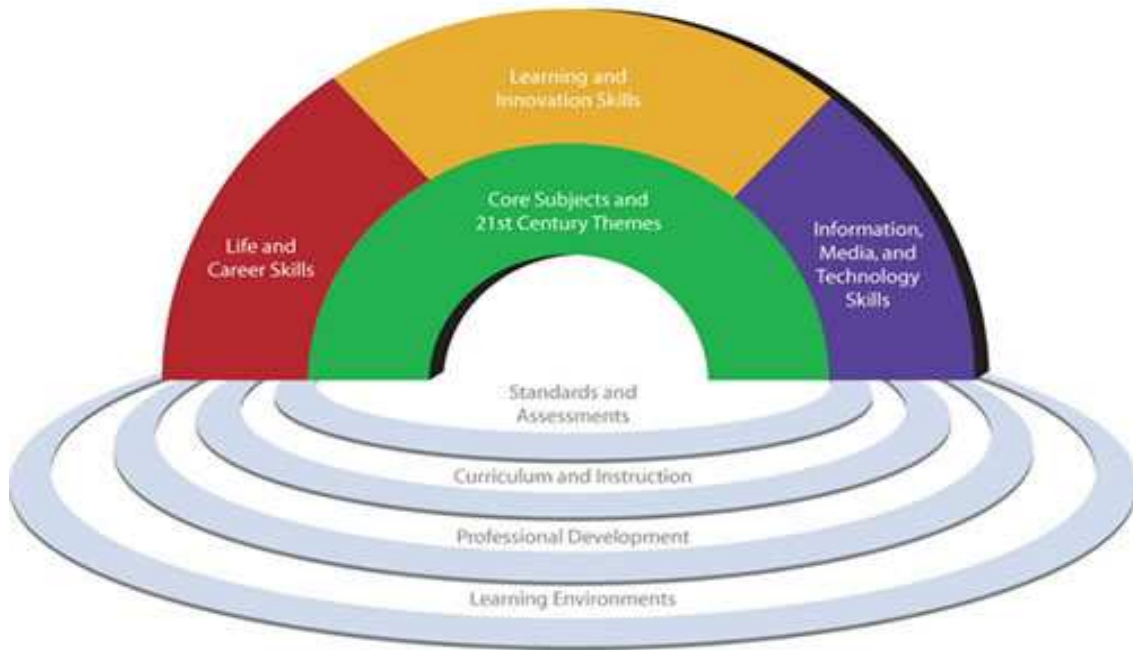
Dengan demikian paradigma pendidikan nasional abad XXI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menghadapi abad XXI yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global di dunia ini, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (*humaniora*) dengan keseimbangan yang wajar.
- b. Pendidikan ilmu pengetahuan, bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap kelilmuan dan terhadap ilmu pengetahuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkan kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati.
- c. Untuk mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke *frontier* ilmu. Namun demikian, penting pula pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.
- d. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati, untuk kepentingan bangsa.
- e. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.
- f. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.
- g. Untuk memungkinkan seluruh warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).
- h. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus dihentikan.

4.5. Kualifikasi SDM Abad XXI

Perubahan radikal dan dalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ini membutuhkan perhatian yang cermat oleh para pelaku dan pengambil keputusan di pemerintahan. Salah menilai, menyusun, dan mengembangkan kebijakan akan berakibat fatal terhadap laju pertumbuhan sebuah negara. Dari seluruh komponen dan aspek pertumbuhan yang ada, manusia merupakan faktor yang terpenting karena merupakan pelaku utama dari berbagai proses dan aktivitas kehidupan. Oleh karena itulah maka

berbagai negara di dunia berusaha untuk mendefinisikan karakteristik manusia abad XXI yang dimaksud. Berdasarkan “21st Century Partnership Learning Framework”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI, yaitu:



- a. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (***Critical-Thinking and Problem-Solving Skills***)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (***Communication and Collaboration Skills***) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- c. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (***Critical-Thinking and Problem-Solving Skills***)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- d. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (***Communication and Collaboration Skills***) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- e. Kemampuan mencipta dan membarui (***Creativity and Innovation Skills***) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- f. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (***Information and Communications Technology Literacy***) – mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;

- g. Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) – mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi;
- h. Kemampuan informasi dan literasi media (*Information and Media Literacy Skills*) – mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.

Di samping itu didefinisikan pula sejumlah aspek berbasis karakter dan perilaku yang dibutuhkan manusia abad XXI, yaitu:

- a. *Leadership* – sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan;
- b. *Personal Responsibility* – sikap bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri;
- c. *Ethics* – menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial bersama;
- d. *People Skills* – memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial;
- e. *Adaptability* – mampu beradaptasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan;
- f. *Self-Direction* – memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu;
- g. *Accountability* – kondisi di mana seorang individu memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan;
- h. *Social Responsibility* – memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya; dan
- i. *Personal Productivity* – mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

Banks menambahkan bahwa selain keahlian dan karakter tersebut, dibutuhkan pula kemampuan seorang individu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang nyata berada di hadapan mereka pada abad XXI, terutama terkait dengan:

- a. *Global awareness* – kemampuan dalam melihat tren dan tanda-tanda jaman terutama dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi;
- b. *Financial, economic, business and entrepreneurial literacy* – keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya untuk meningkatkan kemandirian berusaha;
- c. *Civic literacy* – kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam; dan
- d. *Environmental awareness* – kemauan dan keperdulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar.

BAB V: STRATEGI PENCAPAIAN

5.1. Model Pendidikan Masa Mendatang

Sadar akan tingginya tuntutan “penciptaan” SDM, maka sistem serta model pendidikan pun harus mengalami transformasi. Telah banyak literatur yang merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini, bahkan beberapa model pendidikan yang sangat berbeda telah diterapkan oleh sejumlah sekolah maupun kampus di berbagai belahan dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dideskripsikan sejumlah ciri dari model pendidikan di abad XXI yang perlu dicermati dan dipertimbangkan sebagian besar dipaparkan berikut ini.

5.1.1. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Tidak dapat disangkal lagi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu penyebab dan pemicu perubahan dalam dunia pendidikan. Dengan ditemukan dan dikembangkannya internet – sebuah jejaring raksasa yang menghubungkan milyaran pusat-pusat data/informasi di seluruh dunia dan individu/komunitas global – telah merubah proses pencarian dan pengembangan ilmu dalam berbagai lembaga pendidikan. Melalui *search engine* seorang ilmuwan dapat dengan mudah mencari bahan referensi yang diinginkannya secara “*real time*” dengan biaya yang teramat sangat murah; sementara dengan memanfaatkan “*electronic mail*” para ilmuwan berbagai negara dapat berkolaborasi secara efektif tanpa harus meninggalkan laboratoriumnya; atau dengan mengakses situs repositori video seorang mahasiswa dapat melihat rekaman kuliah dosen dari berbagai universitas terkemuka di dunia. Semua itu dimungkinkan karena bahan ajar dan proses interaksi telah berhasil “didigitalisasikan” oleh kemajuan teknologi. Salah satu butir kesepakatan Konferensi WSIS (*World Summit of Information Society*) tahun 2004 di Jenewa, telah disepakati bahwa paling lambat tahun 2015, seluruh sekolah-sekolah hingga kampus-kampus di seluruh dunia telah terhubung ke internet. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses tukar menukar pengetahuan dan kolaborasi antar siswa-siswa dan guru-guru di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

5.1.2. Peran Strategis Guru/Dosen dan Peserta Didik

Dengan adanya dan mudahnya akses terhadap berbagai pusat pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka peran guru/dosen dan peserta didik pun menjadi berubah. Kalimat “*the world is my class*” mencerminkan bagaimana seluruh dunia beserta isinya ini menjadi tempat manusia pembelajar meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, dalam arti kata bahwa proses pencarian ilmu tidak hanya berada dalam batasan dinding-dinding kelas semata. Peran guru pun tidak lagi menjadi seorang “*infomediary*” karena sang peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang selama ini harus diseminasi atau didistribusikan oleh guru/dosen di kelas. Guru akan lebih berfungsi sebagai fasilitator, pelatih (“*coach*”), dan pendamping para siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Bahkan secara ekstrim, tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam sejumlah konteks, guru dan murid bersama-sama belajar dan menuntut ilmu melalui interaksi yang

ada di antara keduanya ketika sedang membahas suatu materi tertentu. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pun harus diperluas melampaui batas-batas ruang kelas, dengan cara memperbanyak interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya dalam berbagai bentuk metodologi.

5.1.3. Metode Belajar Mengajar Kreatif

Berpegang pada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talentanya masing-masing, maka metode belajar mengajar pun harus memperhatikan keberagaman “learning style” dari masing-masing individu. Oleh karena itulah model belajar yang menekankan pada ciri khas dan keberagaman ini perlu dikembangkan, seperti misalnya yang diperkenalkan dalam: PBL (*Problem Based Learning*), PLP (*Personal Learning Plans*), PBA (*Performance Based Assessment*), dan lain sebagainya. Di samping itu, harus pula ditekankan model pembelajaran berbasis kerjasama antar individu tersebut untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dan kehidupan sosialnya, seperti yang diajarkan dalam konsep: *Cooperative Learning*, *Collaborative Learning*, *Meaningful Learning*, dan lain sebagainya. Adalah merupakan salah satu tugas utama guru untuk memastikan bahwa melalui mekanisme pembelajaran yang dikembangkan, setiap individu dapat mengembangkan seluruh potensi diri yang dimilikinya untuk menjadi manusia pembelajar yang berhasil.

5.1.4. Materi Ajar yang Kontekstual

Besarnya pengaruh media (seperti televisi, surat kabar, majalah, internet, dan radio) terhadap masyarakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi kognitif peserta didik – dalam arti kata bagi mereka akan lebih mudah menggambarkan kejadian atau hal-hal yang nyata (faktual) dibandingkan dengan membayangkan sesuatu yang bersifat abstrak. Oleh karena itulah maka materi ajar pun harus mengalami sejumlah penyesuaian dari yang berbasis konten menjadi berorientasi pada konteks. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengubah pendekatan pola penyelenggaraan pembelajaran dari yang berorientasi pada diseminasi materi dari sebuah mata ajar menjadi pemahaman sebuah fenomena dipandang dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan (multidisiplin atau ragam mata ajar). Contoh-contoh kasus sehari-hari yang ditemui di masyarakat, problem-problem yang bersifat dilematis atau paradoksial, tantangan riset yang belum terpecahkan, simulasi kejadian di dunia nyata, hanyalah merupakan sejumlah contoh materi ajar yang kontekstual dan dapat dicerna oleh peserta ajar dengan mudah. Paling tidak manfaat yang dapat segera diperoleh dari model pembelajaran berbasis multi disiplin ilmu ini adalah bahwa yang bersangkutan dapat mengerti konteks ilmu yang diberikan dalam penerapannya sehari-hari dan di saat yang sama diperoleh sejumlah alternatif pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

5.1.5. Struktur Kurikulum Mandiri berbasis Individu

Karena setiap individu berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya, yang didorong dengan cita-cita atau target pencapaian dirinya di masa mendatang, maka struktur kurikulum yang diterapkan pun harus dapat *customised (tailor made curriculum)* sesuai dengan kebutuhan dan rencana atau agenda

masing-masing individu. Mengembangkan kurikulum mandiri berbasis individu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu desain dan konsep yang matang serta terbukti efektif dalam implementasinya. Disamping itu perlu adanya sejumlah prasyarat atau prakondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menerapkan struktur kurikulum seperti ini, antara lain: kesiapan fasilitas dan sarana prasarana, kematangan peserta ajar, infrastruktur dan suprastruktur manajemen institusi yang handal, konten pengetahuan yang lengkap, dan lain sebagainya.

5.2. Pergeseran Paradigma Pendidikan

Model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan abad XXI tersebut hanya akan dapat terwujud jika terjadi pergeseran pola pikir dan pola tindak dalam berbagai konteks penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran. Berikut ini adalah sejumlah pergeseran paradigma yang diyakini perlu dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan memasuki dunia moderen tersebut.

5.2.1. Perubahan Paradigma Pembelajaran

Pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat peserta didik menimba ilmu. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran:

a. dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa

Jika dahulu biasanya yang terjadi adalah guru berbicara dan siswa mendengar, menyimak, dan menulis – maka saat ini guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Fungsi guru dari pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi siswa-siswanya.

b. dari satu arah menuju interaktif

Jika dahulu mekanisme pembelajaran yang terjadi adalah satu arah dari guru ke siswa, maka saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan siswa dalam berbagai bentuk komunikasinya. Guru berusaha membuat kelas semenarik mungkin melalui berbagai pendekatan interaksi yang dipersiapkan dan dikelola.

c. dari isolasi menuju lingkungan jejaring

Jika dahulu siswa hanya dapat bertanya pada guru dan berguru pada buku yang ada di dalam kelas semata, maka sekarang ini yang bersangkutan dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh via internet.

d. dari pasif menuju aktif-menyelidiki

Jika dahulu siswa diminta untuk pasif saja mendengarkan dan menyimak baik-baik apa yang disampaikan gurunya agar mengerti, maka sekarang disarankan agar siswa harus lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya.

e. dari maya/abstrak menuju konteks dunia nyata

Jika dahulu contoh-contoh yang diberikan guru kepada siswanya kebanyakan bersifat artifisial, maka saat ini sang guru harus dapat memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari dan relevan dengan bahan yang diajarkan.

f. dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim

Jika dahulu proses pembelajaran lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-masing individu, maka yang harus dikembangkan saat ini adalah model pembelajaran yang mengedepankan kerjasama antar individu.

i. dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan

Jika dahulu ilmu atau materi yang diajarkan lebih bersifat umum (semua materi yang dianggap perlu diberikan), maka saat ini harus dipilih benar-benar ilmu atau materi yang benar-benar relevan untuk ditekuni dan diperdalam secara sungguh-sungguh (hanya materi yang relevan bagi kehidupan sang siswa yang diberikan).

j. dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjur

Jika dahulu siswa hanya menggunakan sebagian panca inderanya dalam menangkap materi yang diajarkan guru (mata dan telinga), maka saat ini seluruh panca indera dan komponen jasmani-rohani harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotorik).

k. dari alat tunggal menuju alat multimedia

Jika dahulu ilmu guru hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka saat ini diharapkan guru dapat menggunakan beranekaragam peralatan dan teknologi pendidikan yang tersedia – baik yang bersifat konvensional maupun moderen.

l. dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif

Jika dahulu siswa harus selalu setuju dengan pendapat guru dan tidak boleh sama sekali menentangnya, maka saat ini harus ada dialog antar guru dan siswa untuk mencapai kesepakatan bersama.

m. dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan

Jika dahulu seluruh siswa tanpa kecuali memperoleh bahan atau konten materi yang sama, maka sekarang ini setiap siswa berhak untuk mendapatkan konten sesuai dengan ketertarikan atau keunikan potensi yang dimilikinya.

n. dari usaha sadar tunggal menuju jamak

Jika dahulu siswa harus secara seragam mengikuti sebuah cara dalam berproses maka yang harus ditonjolkan saat ini justru adanya keberagaman inisiatif yang timbul dari masing-masing individu.

o. dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak

Jika dahulu siswa hanya mempelajari sebuah materi atau fenomena dari satu sisi pandang ilmu, maka saat ini konteks pemahaman akan jauh lebih baik dimengerti melalui pendekatan pengetahuan multi disiplin.

p. dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan

Jika dahulu seluruh kontrol dan kendali kelas ada pada sang guru, maka sekarang ini siswa diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing.

q. dari pemikiran faktual menuju kritis

Jika dahulu hal-hal yang dibahas di dalam kelas lebih bersifat faktual, maka sekarang ini harus dikembangkan pembahasan terhadap berbagai hal yang membutuhkan pemikiran kreatif dan kritis untuk menyelesaikannya.

r. dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan

Jika dahulu yang terjadi di dalam kelas adalah “pemindahan” ilmu dari guru ke siswa, maka dalam abad moderen ini yang terjadi di kelas adalah pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan sesamanya.

Akhirnya, perubahan hanya dapat terjadi dan memberikan dampak yang bermakna jika dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Untuk itulah maka diperlukan keberanian untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional yang dimiliki saat ini, mengkaji celah yang ada dengan kebutuhan karakteristik sistem pendidikan abad XXI, dan menentukan program-program yang harus segera dilaksanakan untuk menutup kesenjangan dan mengejar kemajuan yang terjadi di dunia pendidikan nasional.

5.3. Strategi Pengambilan Kebijakan

Strategi pencapaian Pendidikan Nasional abad XXI dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeanekaragaman geo-demografis, budaya, dan memperhatikan tantangan global dan lokal tentang budaya – karakter bangsa, serta adanya potensi, harus mencakup tanggung jawab pemangku kepentingan terkait dalam menentukan kebijakan dan kemauan politik untuk menghadapi tantangan perubahan paradigma. Strategi pendidikan meliputi pelaksanaan operasional untuk mencapai sasaran paradigma sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan komitmen, meningkatkan pemberdayaan pemangku kepentingan antara-lain badan eksekutif pusat sampai daerah dan jajarannya maupun badan legislatif pusat dan daerah melalui tugas dan fungsi terkait.
- b. Meningkatkan keterlibatan sektor informal dan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam pendidikan nonformal maupun informal sesuai dengan paradigm baru
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas inovatif masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan paradigma yang sesuai dengan budaya setempat.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan yang mengacu pada implementasi paradigma.
- e. Meningkatkan dan pemeratakan keberadaan pendidikan formal, serat nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi pengembangan daerah masing-masing

Strategi pelaksanaan pendidikan nasional berbasis perubahan paradigma yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan input, proses dan target luaran yang akan dicapai baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal .

5.3.1. Input

- a. meningkatkan kesempatan mendapat pendidikan dalam bidang sains dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat khususnya bagi masyarakat dari daerah tertinggal, perbatasan dan daerah terisolir.
- b. program matrikulasi untuk mencapai pendidikan tinggi bagi masyarakat, yang karena situasional keadaan daerahnya yang tertinggal tidak dimungkinkan pengembangan potensi optimal peserta didik.

5.3.2. Proses

- a. menetapkan sistem pendidikan nasional yang diterima seluruh komponen bangsa, dengan mempertahankan dan menggunakan pengantar bahasa Indonesia serta memelihara, mempertahankan pertumbuhan bahasa daerah beserta budaya lokalnya.
- b. menumbuhkan dan meningkatkan model proses belajar mengajar melalui riset transisional.
- c. meningkatkan sumber daya setempat sebagai pendidik dengan wawasan paradigma.
- d. meningkatkan jiwa kewirausahaan yang inovatif-kreatif.
- e. mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan formal khususnya daerah tertinggal, perbatasan dan terisolir.

5.3.3. Output (Luaran)

Hasil didik menyadari pentingnya toleransi atas keanekaragaman etnis-budaya-bahasa dan agama serta menerapkan karakter moral sebagai dasar tindakan dan perbuatan.

5.3.4. Outcome

Terbentuknya bangsa yang beradab dan berkarakter serta berbudaya.

--- oOo ---

DAFTAR PUSTAKA

- Azim, Kidwai, C. H. Lai. 1990. *Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam*, World Scientific, Singapore.
- Ackoff, Russell L.& Greenberg, Daniel. 2008. *Turning Learning Right Upside Up: Putting Education Back on Track*, Wharton School Publishing, New Jersey.
- Arthur, W Brian. 2009. *"The Nature Of Technology What it is and How it Evoves"*, Free Press, N.Y.
- Bertelmann Group for Policy Research, ed., *Tolerance: Basis for Democratic Interaction*. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000. Dapat juga dilihat melalui <http://www.tolerance-net.org/downloads/tolerance.pdf>.
- Braun, Karen. April 2009. "Social Entrepreneurship: Perspectives on an Academic Discipline". *Theory in Action*, Vol.2, No.2.
- Brockman, John (ed.). 2010. *"This Will Change Everything Ideas that will Shape The Future"* Harper Perennial, New York
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*, Penerbit Kanisius.
- Castells, Manuel. 2007. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society" *International Journal of Communication*, (238-266)
- Denzin, Norman K. 1989. *The Reseach Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Edward de Bono. 2000. *Pemikiran Baru Era Milenium*, Penerbit Elex Kompatindo.
- Elkington, John. dan Pamela Hartigan. 2008. *The Power of Unreasonable People*. Boston: Harvard Business Press.
- Etzioni, Amitai. 1996. "Positive Aspects of Community and the Dangers of Fragmentation" dalam Cynthia Hewitt de Alcántara. *Social Futures, Global Visions*. Oxford: Blackwell Publishers, Ltd. And UNRISD.
- Freud, Sigmund. 2007. *Das Unbehagen in der Kultur*, Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, REPRINT. (Pertama terbit, 1930).
- Friedman, Thomas L. 2008. *"Hot, Flat and Crowded"*, Allen Lane Penguin Group
- Fukuyama, Francis. 1989. *"The End of History"*. The National Interest. Summer.
- Gardner, Howard. 2007. *"Five Minds For The Future"* Harvard Business School Press.
- H.A.R.Tilaar. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional menyongsong Abad XXI*, Balai Pustaka.
- Habermas, Jürgen. 1996. *On the Logic of the Social Sciences*, Cambridge/Mass: The MIT Press [1967].

- Hertzmark, Donald I. March 2007. “”Pertamina: Indonesia's State-Owned Oil Company.” Paper Prepared in Conjunction with An Energy Study Sponsored by The James A. Baker III Institute for Public Policy and Japan Petroleum Energy Center, Rice University.
- Hidayat, Bambang, *Scientists and Their Society: Between Advocacy and Arbitration*, Presented at the ICOLA Meeting, Yogyakarta 5-7 September, 2007.
- Human Development Report 2009 – HDI rankings. Dapat diakses melalui <http://hdr.undp.org/en/statistics/>
- Inglehart, Ronald. 2006. “Budaya dan Demokrasi” (terj.). Dikutip dari buku “*Kebangkitan Peran Budaya*” ed. Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, LP3 ES hal 130-152.
- Jencks, Charles. 1992. “*The Post-Modern Reader*”, Academy Edition, London
- Kuhn, S. Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press, [1962].
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2009. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Kymlicka, Will. 1993. “Some Question about Justice and Community,” dalam Daniel Bell, *Communitarianism and Its Critics*. Appendix. Oxford: Clarendon Press.
- Lechona, Thomas. 1993. "The Return of Character Education". *Educational Leadership* 51(3). Kaplan, Robert, D. 2000. *The Coming Anarchy*. New York: Random House.
- Lewis, Richard D. 2006. 3rd.ed. *When Cultures Collide*, Nicholas Brealey International.
- Lim, Francis. 2008. “*Filsafat Teknologi Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat*” Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta : Idayu Press.
- Maffesoli. Michel. 1996. *The Time of the Tribes : The Decline of Individualism in Mass Society*. London ; Thousand Oaks, CA. : Sage.
- Mahbubani, Kishore. 2008. “ *The New Asian Hemisphere*”, Public Affairs, N.Y.
- Martin, Patricia. 2009. *Renaissance Generation*, Adams Media, Avon.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Tanpa Tempat: Indonesia Heritage Foundation.
- Mehmet Ergin, Moneef Oubi. 2008. *Science, Technology and Innovation for Socioeconomic Development*, IAS.
- Montuori, Alfonso. 2005. "Gregory Bateson and the Promise of Transdisciplinarity. *Cybernetics and Human Knowing*, 12, 147-158.
- Mulder, Niels, 1996. *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*, Amsterdam/Kuala Lumpur: The Pepin Press.

- Nitobe, Inazo. 2001. *Bushido*. Tokyo: Tuttle Publishing.
- Pervez Hoodbhoy. 1992. *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*, Zed Books, London.
- Peterson, C. dan Saligman, M.E.P. 2003. "Character Strengths Before and After September 11", *Psychological Science*, Vol. 14, No. 4, pp. 381-4.
- Peterson, C. dan Saligman, M.E.P. 2003. *Character Strengths and Virtue: A Handbook and Classification*. New York: Oxford University Press, NY.
- Prasodjo, Imam. 2008. "Merajut Kembali Indonesia yang Tercabik" dalam Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, eds. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam. 2007. "Strategi Kebudayaan di Era Globalisasi". Makalah pada Orasi Budaya yang diselenggarakan oleh Galeri Publik (Institute for Global Justice) di Jakarta, 26 Juli 2007.
- Ridley, Matt (terjemahan 2005). "*Genom Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab*" Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, Theo, *Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang Pendidikan*, <http://www.bruderfic.or.id/h-59/pemikiran-ki-hajar-dewantara-tentang-pendidikan.html>, 02.05.2004.
- Sachs, Jeffrey D. 2008. "*Common Wealth*" Penguin Press, N.Y.
- Sarros, James C., Brian K. Cooper, dan Anne M. Hartigan. 2006. "Leadership and Character", *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 27, No.8, 2006, hal. 682-699.
- Schwarz, Adam, 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, St.Leonards: Allen & Unwin, Pty. Ltd.
- Sedyawati, Edi. 2006. "*Budaya Indonesia- Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Semiawan, Conny. 2007. *Catatan Kecil tentang Penelitian, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Berbagai Jenis Penelitian*. Jakarta: Prenada Media.
- Shenandoah, April, *History of America's Education Noah Webster & Education in Early America*, Second of Three Parts, Copyright © 2002 By The AmericanPartisan.<http://www.american-partisan.com/cols/2002/shenandoah/qtr1/0304.htm>.
- Snyder, Jack. 2000. *From Voting to Violence*. New York: W.W. Norton & Company.
- Soekarno, 1963, *Di bawah Bendera Revolusi*. Jilid 1. Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi.
- Soros, George. 2010. "*The Soros Lectures*" At The Central European University, Public Affairs, New York
- Superka, D., Ahrens, C. and Hedstrom, J. 1976. *The Values Education Sourcebook*. Boulder, CO: Social Science Education Consortium.

- Surachmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Penerbit Kompas.
- Toer, Pramudya Ananta. 2003. "The Revolution Begun in 1945 Must Be Completed" dalam *Inside Indonesia*, Oktober-Desember. Juga dapat diakses pada <http://insideindonesia.org/content/view/282/29/>.
- Turner, Peter, *et al.*, 1997. *Indonesia*, Hawthorn: Lonely Planet Publications.
- Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeudin. 2004. *Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)*. Jakarta: UNSFIR.
- Vincent, Bernadette Bensauade. 2008. "Technoscience and Convergence: A Transmutation of Values?" Makalah yang dipresentasikan pada Summerschool on Ethics of Converging Technologies, 21-28 September 2008, Dormotel Vogelsberg, Omrod / Alsfeld, Germany.
- Watson, Peter. 2000. "A Terrible Beauty -- The People and Ideas that Shaped Modern Mind" Phoenix Press, London.
- Westland, Chris. 2002. "Valuing technology" John Wiley and Sons (Asia), Singapore
- Wilson, Edward. 1998. "Consilience: The Unity of Knowledge" Alfred A. Knoff
- World Bank. Februari 2001. "Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition".
- Zainuddin, Imam Buchori. 2010. "Pokok Pokok Pikiran Dalam Membangun Budaya dan Karakter Bangsa". (Disampaikan dalam Sarasehan Nasional: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, diselenggarakan oleh DIKTI tanggal 7 April 2010 di Bandung.)
- Zainuddin, Imam Buchori. 2010. "Wacana Desain", Penerbit ITB, Bandung

LAMPIRAN

Dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun beberapa Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, disusunlah berbagai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar dan buku dan dapat disusun sebagai berikut.

Untuk standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Standar Isi Program Paket a, Program paket B, dan Program Paket C.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Konghucu
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang SK & KD Kompetensi Kejuruan SMK/MAK

Untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar

- Pengawas Sekolah/Madrasah
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pengelola Kursus dan Pelatihan
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tenaga Administrasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C
 - m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelola Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C
 - n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

Untuk standar pengelolaan, standar penilaian, standar proses, dan standar biaya masing-masing satu peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Standar Pengelolaan (PNF, Pemerintahan Daerah, dan Kabupaten Kota).
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Untuk standar sarana dan prasarana, permendiknas yang telah disusun sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana & Prasarana SLB
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana & Prasarana SMK

Untuk perbukuan dan segala yang berkaitan dengan buku, permendiknas yang telah disusun sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan tentang Buku Teks Pelajaran
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan tentang Buku Teks Pelajaran Sejarah
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Permendiknas yang berkaitan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.

Pada tahun 2010 terjadi perubahan nama dari Departemen menjadi Kementerian, hal ini diatur dalam Permendiknas Nomor 1 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen

Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Dilanjutkan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014 yang diatur dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010.

Ada beberapa Permendiknas tentang akreditasi, misalnya Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Permendiknas Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis antara lain bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD RI tahun 1945.

Untuk peraturan Ujian Nasional (UN) sekolah formal, UN Program Paket, dan Ujian Sekolah (US), pemerintah menyusun setiap tahun untuk hal tersebut disertai dengan perkembangan dan dinamika masing-masing kegiatan.

Sebagai tambahan, demi mengurangi, mencegah, dan menanggulangi plagiat, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.